

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II

Desa Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Hasil BME

□ SUKO BANDIYONO

□ NGADI

□ SUDIYONO



LIPI

CRITC - LIPI
2007



COREMAP-LIPI

**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
DI LOKASI COREMAP II**

Desa Tuapejat, Kabupaten Mentawai

Hasil BME

SUKO BANDIYONO
NGADI
SUDIYONO



LIPI

CRITC – LIPI
2007



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang, agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan sampai pada pertengahan program. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji dari aspek bio-fisik dan sosial ekonomi. Terjadinya peningkatan tutupan karang sebesar 2 persen per tahun merupakan indikator keberhasilan dari aspek bio-fisik. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi diharapkan pendapatan per-kapita penduduk naik sebesar 2 persen per tahun dan terjadi peningkatan kesejahteraan sekitar 10.000 penduduk di lokasi program.

Untuk melihat keberhasilan tersebut perlu dilakukan penelitian benefit, monitoring, evaluation (BME) baik ekologi maupun sosial-ekonomi. Penelitian BME ekologi dilakukan setiap tahun untuk memonitor kesehatan karang, sedangkan BME sosial-ekonomi dilakukan pada tengah dan akhir program. BME sosial-ekonomi bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil BME sosial-ekonomi ini selain dapat dipakai untuk memantau perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan penduduk di lokasi COREMAP, juga dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program, baik di tingkat nasional, kabupaten maupun di tingkat lokasi. Dengan adanya evaluasi dan masukan-masukan bagi pengelola dan pelaksana program, diharapkan dalam sisa waktu yang

ada sampai akhir program fase II, keberhasilan COREMAP dari indikator bio-fisik dan sosial-ekonomi dapat tercapai.

Buku laporan ini merupakan hasil dari BME sosial-ekonomi yang dilakukan pada tahun 2007 di lokasi-lokasi Coremap di Indonesia Bagian Barat (lokasi Asian Development Bank/ADB). BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku laporan melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan: masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di lokasi Tuapejat kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit pelaksana COREMAP di Kabupaten Mentawai, CRITC Kabupaten Mentawai dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini.

Jakarta, Desember 2007

Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Prof. DR. Ono Kurnaen Sumadhiharga, MSc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR PETA, GAMBAR DAN DIAGRAM	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Metodologi	6
1.4. Pembabakan Penulisan	8
BAB II. PROFIL LOKASI PENELITIAN	9
2.1. Keadaan Geografis	9
2.2. Potensi Sumber Daya Alam dan Pengelolaannya	15
2.2.1. Keadaan SDA	15
2.2.2. Wilayah Pengelolaan	17
2.2.3. Teknologi Penangkapan	20
2.2.4. Sarana dan prasarana (terkait pengelolaan SDL dan kesejahteraan)	21
2.2.5. Program dan Kegiatan dalam Pengelolaan SDL	28
2.3. Kependudukan	30
2.3.1. Jumlah dan Komposisi	30
2.3.2. Pendidikan dan Ketrampilan	33
2.3.3. Pekerjaan	36
2.3.4. Kesejahteraan	39
2.3.4.1. Pemilikan dan penguasaan asset	39
2.3.4.2. Kondisi permukiman dan sanitasi lingkungan	44

BAB III. COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA	49
3.1. Pelaksanaan COREMAP :	
Permasalahan dan Kendala	49
3.1.1. Tingkat Kabupaten	49
3.1.2. Tingkat Desa	51
• Pembentukan, kinerja dan kegiatan LPSTK	51
• Pembentukan, kinerja dan kegiatan Pokmas	56
• Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan	58
• Kegiatan pengawasan	60
• Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	61
3.2. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan/Program COREMAP	61
 BAB IV. PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA	 67
4.1. Pendapatan Penduduk	67
4.1.1. Pendapatan per Bulan Menurut Lapangan Pekerjaan	72
4.1.2. Pendapatan RT dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim	76
4.2. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan	80
4.2.1. COREMAP dan Program Pemerintah Lainnya	80
4.2.2. Faktor Internal	82
4.2.3. Faktor Eksternal	83
 BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Rekomendasi	86
 DAFTAR PUSTAKA	 89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kerusakan Karang Nasional	3
Tabel 2.1.	Komposisi Penduduk Dusun Tuapejat Menurut Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	31
Tabel 2.2.	Penduduk Dusun Tuapejat Usia 6 Tahun Keatas, Menurut Kegiatan Utama yang Dilakukan dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	33
Tabel 2.3.	Komposisi Penduduk Desa Tuapejat Umur 6 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun 2005-2007	34
Tabel 2.4.	Penduduk Dusun Tuapejat yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2005 dan 2007	37
Tabel 2.5.	Penduduk Dusun Tuapejat yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2005 dan 2007	38
Tabel 2.6.	Penduduk Dusun Tuapejat yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2005 dan 2007	39
Tabel 2.7.	Distribusi Memiliki Aset Menurut Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Asset di Dusun Tuapejat Tahun 2005 dan Tahun 2007	43
Tabel 3 1.	Prosentase Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Program COREMAP Desa Tuapejat, 2007	62

Tabel 3.2.	Persentase Keterlibatan Responden Pada Kegiatan COREMAP Desa Tuapejat, 2007.	64
Tabel 4.1.	Statistik Pendapatan Penduduk per Bulan di Desa Tuapejat, Mentawai tahun 2005 dan 2007	69
Tabel 4.2.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan	71
Tabel 4.3.	Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Menurut Lapangan Pekerjaan KRT di Desa Tuapejat, Mentawai	74
Tabel 4.4.	Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Menurut Jenis Pekerjaan KRT di Desa Tuapejat, Mentawai	76
Tabel 4.5.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan	77
Tabel 4.6.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga (RT) dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim di Desa Tuapejat, Mentawai (Rp)	79

DAFTAR PETA, DIAGRAM DAN GAMBAR

Peta 1.1.	Lokasi LIT di Sipora	4
Peta 2.1.	Peta karang hidup hasil RRI di Tuapejat, Pulau Sipora	11
Peta 2.2.	Peta Sumber Daya Laut yang Dibuat Nelayan	18
Peta 3.1.	Peta Hak Ulayat Suku Katubuoinan dan Samubei Desa Tuapejat	54
Gambar 2.1.	Sumber Daya Laut yang Ditangkap Nelayan Tuapejat	16
Gambar 2.2.	Pelabuhan Tuapejat	23
Diagram 4.1.	Pendapatan Perkapitan Penduduk Tuapejat, Garis Kemiskinan 1\$ dan 2 \$ US	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Barat sebagai hasil dari UU No.49 Tahun 1999 tentang pemekaran daerah. Sebelumnya daerah kepulauan Mentawai adalah bagian dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Mentawai merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari 4 pulau besar dan 319 pulau kecil, dengan garis pantai lebih dari 750 Km. Hal ini berarti bahwa kepulauan Mentawai seperti halnya Indonesia, mempunyai perairan beserta ekosistemnya, mengandung kekayaan sumberdaya alam yang besar dan beraneka ragam, sehingga telah menjadi asset dasar bagi pembangunan. Salah satu dari tiga ekosistem penting daerah pesisir dan sekaligus suatu sistem ekologi laut yang mempunyai sifat kompleks adalah terumbu karang. Dalam ekosistem terumbu karang diperkirakan lebih dari satu juta spesies mendiami ekosistem tersebut dan telah diidentifikasi lebih dari 93 ribu spesies yang hidup. Komunitas terumbu karang yang saling berinteraksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik telah membuat pesisir sebagai habitat perlindungan, pemijahan dan pembesaran berbagai biota laut. Ini berarti bahwa dalam ekosistem terumbu karang mempunyai kekayaan plasma nutfah yang sangat besar. Terumbu karang kendati mempunyai sifat yang dapat pulih kembali (*renewable*), namun kemampuan untuk pulih kembali bila mengalami kerusakan sangat terbatas. Oleh karena itu kerusakan pada ekosistem terumbu karang akan berakibat terputusnya hubungan kait-mengkait antar komponen biotik dan antar komponen abiotik, termasuk tidak berfungsinya sebagai pelindung dari ombak dan abrasi laut.¹

¹ Uraian lebih dalam tentang isu terumbu karang dapat dibaca dari buku Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Terumbu Karang. Oleh Panitia Program MAB Indonesia, LIPI. Jakarta: 10-12 Oktober 1995.

Selain terumbu karang yang mempunyai nilai ekologis, terumbu karang dilihat dari kepentingan kehidupan manusia merupakan sumber bahan makanan dan sekaligus sumber bahan obat-obatan dan kosmetik yang sangat dibutuhkan oleh manusia masa kini dan masa mendatang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap hari tanpa disadari penduduk telah memanfaatkan sumberdaya laut dan ekosistem terumbu karang, antara lain berbagai jenis ikan karang, udang-udangan, dan kerang-kerangan tidak sekedar untuk konsumsi rumah tangga namun telah menjadi komoditi ekspor ke luar negeri (Daliyo dan Suko Bandiyono. 2002: 1). Selain itu kondisi lingkungan laut yang apik bahkan telah menjadi obyek wisata bahari yang banyak dicari oleh wisatawan asing. Perkembangan wisata bahari dengan sendirinya akan memberi pengaruh ganda antara lain pengembangan perhotelan, rumahmakan, kerajinan, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pada saat ini puluhan ribu penduduk Mentawai yang tinggal di 34 desa pantai kehidupannya telah tergantung dari hasil penangkapan biota laut pada ekosistem terumbu karang, termasuk masyarakat di daerah penelitian yaitu Dusun Tuapejat, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora. Hasil wawancara dengan banyak nelayan pada saat penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa hasil tangkapan berbagai jenis ikan karang oleh para nelayan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa jumlah populasi ikan di daerah tersebut cenderung berkurang dan telah mengindikasikan terjadinya degradasi ekosistem terumbu karang di daerah tersebut.

Hasil penelitian Tim Ekologi LIPI telah mengukur kerusakan karang di 686 lokasi stasiun di Indonesia. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1.
Kerusakan Karang Nasional

Wilayah Indonesia	Jumlah lokasi stasiun	Kualitas karang			
		Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang
Barat	278	5,40	24,10	34,17	36,33
Tengah	213	6,10	31,92	45,07	16,30
Timur	195	6,15	21,03	30,77	42,05
Indonesia	686	5,83	25,66	36,59	31,92

Sumber: Suharsono.2005 (www.coremap.go.id)

Catatan: Nilai kategori

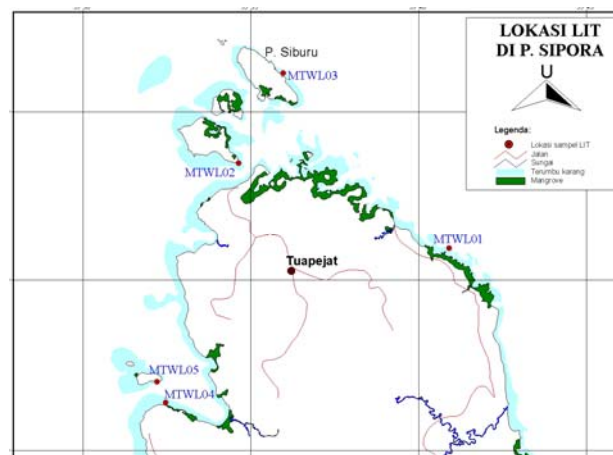
Sangat baik : 75-100 %
Baik : 50-74,9 %
Cukup : 25-49,9 %
Kurang : 0 -24,9 %

Atas dasar hasil penelitian tersebut jelas menunjukkan bahwa hampir sepertiga karang di Indonesia kualitasnya tergolong kurang baik, bahkan untuk wilayah Indonesia Barat (termasuk daerah Mentawai) persentasenya telah mencapai 36,33 persen. Di wilayah barat kondisi karang yang tergolong sangat baik hanya 5,4 persen, lebih rendah daripada kondisi nasional sebesar 5,83 persen. Ancaman kerusakan terumbu karang juga dipengaruhi perubahan suhu global yang makin panas, sehingga temperatur air laut dapat naik lebih dari 31 derajat Celcius. Temperatur air laut yang ideal bagi pertumbuhan ekosistem berkisar antara 28-31 derajat Celcius. Khusus untuk daerah Mentawai ancaman kerusakan terumbu karang juga akan dialami sejalan akan terjadinya gempa-tsunami di daerah tersebut, yang waktunya belum dapat dipastikan. Hasil penelitian LIPI menunjukkan bahwa daerah tersebut pernah terjadi gempa di atas 9 skala Richter dan menimbulkan tsunami besar pada tahun 1797 dan 1833 (Kompas, 23 Juni 2007).

Sebagai respons atas kondisi terumbu karang, pemerintah Indonesia dengan bantuan dana dari ADB dan Bank Dunia, telah meluncurkan program pengelolaan terumbu karang yang disebut COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program). Dalam program tersebut, kebijakan implementasi telah

didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten dengan sistem pendanaan yang berkelanjutan, namun dikoordinir secara nasional. Instansi pemerintah daerah yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten. Desentralisasi pengelolaan terumbu karang ini dilakukan untuk mendukung dan sekaligus memberdayakan masyarakat pantai. Diharapkan dalam program COREMAP tersebut bahwa masyarakat pantai dapat melakukan *co-management* secara berkelanjutan agar kerusakan terumbu karang dapat dicegah, dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peta 1.1
Lokasi LIT di Sipora



Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program COREMAP terutama dilihat dari segi *outcome* dan *impact* yang meliputi aspek biofisik dan aspek sosial-ekonomi. Indikator dari aspek biofisik bahwa program tersebut akan dapat meningkatkan tutupan karang paling tidak 5 persen per tahun, sampai tercapai pada level yang sama dengan daerah lain yang telah dikelola dengan baik atau daerah terumbu karang yang masih asli/belum dimanfaatkan (*pristine area*). Adapun indikator keberhasilan dilihat dari aspek sosial-ekonomi adalah :

1. Pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program yaitu tahun 2009.
2. Paling sedikit 70 persen dari masyarakat nelayan (beneficiary) merasakan dampak positif program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status ekonomi mereka.

Sejalan dengan program COREMAP, lebih dahulu diadakan penelitian data dasar aspek sosial-ekonomi terumbu karang. Untuk daerah Tuapejat penelitian data dasar telah dilakukan pada bulan Juli 2005. Penelitian ini dimaksudkan sebagai masukan dalam menentukan rancangan program di daerah penelitian Tuapejat agar sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan sebagai penentu data dasar atau titik awal (T0) yang dapat menggambarkan kondisi obyektif sosial-ekonomi masyarakat sebelum program intervensi COREMAP II dilakukan.

Setelah tahun 2005 berbagai kegiatan program COREMAP II di Desa Tuapejat telah dilakukan antara lain kegiatan kelompok nelayan penangkapan ikan, kelompok pembuatan demplot keramba budidaya ikan kerapu, kelompok demplot keramba budidaya kepiting bakau, dan Pokmas pembuatan daerah perlindungan laut (DPL). Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan baik langsung atau tidak langsung akan bermanfaat atau berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apakah memang demikian ?

1.2. TUJUAN

Untuk dapat memberi masukan tentang arah yang lebih layak dalam mengimplementasikan program COREMAP II 2007-2009 maupun untuk memberi masukan tentang kegiatan yang sedang berjalan, maka diperlukan lebih dahulu data empirik aspek sosial-ekonomi dengan melakukan penelitian. Dengan kata lain penelitian ini bermaksud melakukan monitoring atas pelaksanaan program

COREMAP II 2005-2007. Oleh karena itu tujuan umum penelitian ini adalah mengumpulkan dan menganalisis data dasar tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat Dusun Tuapejat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya terumbu karang yang dilakukan pada bulan Juli 2005 dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan pada bulan Juni 2007. Adapun tujuan lebih khusus penelitian ini adalah :

- Memberikan gambaran umum tentang lokasi COREMAP II yang meliputi kondisi geografi, potensi sumber daya alam, sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya laut
- Menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang dilihat dari jumlah dan komposisi, pendidikan dan kegiatan ekonomi, khususnya yang berbasis terumbu karang.
- Memotret tingkat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan antara lain dari pemilikan asset rumah tangga (produksi dan nonproduksi) dan kondisi perumahan serta sanitasi lingkungan.
- Mendeskripsikan tingkat pendapatan masyarakat khususnya pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

1.3. METODOLOGI

Untuk mencapai tujuan penelitian, lebih dahulu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan beberapa metode: (1) observasi; (2) survei; (3) wawancara mendalam; (4) diskusi kelompok; dan (5) pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada akhir minggu pertama hingga pertengahan minggu kedua bulan Juni 2007. Sebelum penelitian di Desa Tuabejat lebih dahulu tim peneliti mengumpulkan data dan informasi pada instansi terkait pada tataran kabupaten yaitu Dinas DKP, Bappeda, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertanian.

Selanjutnya sebagai langkah awal penelitian tim peneliti melakukan observasi terhadap berbagai obyek yang dianggap relevan yaitu daerah permukiman dan kondisi Desa Tuapejat, alat tangkap, penampungan hasil laut, jenis komoditi di pasar, alat transportasi /komunikasi dan observasi keadaan lingkungan laut. Daerah yang menjadi obyek observasi tersebut kemudian direkam dengan foto digital. Bersamaan dengan waktu observasi kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan survei aspek sosial-ekonomi rumah tangga penduduk untuk tujuan Benefit Monitoring Evaluation (BME).

Survei dilakukan dengan lebih dahulu menentukan kerangka sampel, yaitu daftar keluarga yang pada tahun 2005 telah menjadi responden. Dalam penelitian ini telah ditetapkan target responden yaitu sebanyak 100 keluarga. Dalam melakukan survei tim peneliti dibantu oleh pewawancara setempat, yaitu beberapa orang guru Sekolah Dasar, beberapa orang perangkat desa dan pemuda setempat. Sebelum mereka melakukan tugasnya terlebih dahulu diadakan pelatihan, guna mengetahui latar belakang penelitian, tujuan penelitian, memahami tata cara wawancara dan konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini apabila calon responden telah pindah atau pergi dalam waktu lama maka penghuni rumah tersebut atau tetangga terdekat digunakan sebagai pengganti. Tiap hasil wawancara yang menggunakan instrumen kuesioner, diperiksa oleh tim peneliti. Manakala isian kuesioner dianggap diragukan atau tidak wajar, wawancara ulang dilakukan kembali. Dengan melakukan teknik pengumpulan data tersebut maka dapat diperoleh variasi responden sesuai dengan kondisi riil di daerah tersebut dan responden menyebar.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan yang dianggap mengerti tentang daerah tersebut dan masalah terumbu karang, antara lain kepala Desa Tuapejat, pegawai DKP Kabupaten Mentawai, kepala dusun, penampung ikan dan lobster, nelayan pemancing, dan kepala LPSTK. Di samping itu juga diadakan wawancara bebas dengan masyarakat setempat. Dengan melakukan wawancara mendalam telah diperoleh pengetahuan yang meluas tentang daerah tersebut, terutama isu yang terkait dengan

implementasi program COREMAP II dan masalah hukum adat di daerah tersebut.

Diskusi kelompok dilakukan satu kali yaitu dengan kelompok nelayan dan sekaligus dengan stakeholder setempat yang menangani persoalan terumbu karang. Dengan berbagai teknik wawancara antara lain dapat diperoleh informasi daerah tangkapan ikan, masalah kerusakan lingkungan laut dan pesisir .dan informasi tentang kegiatan program COREMAP II.

Untuk melengkapi penelitian, tim peneliti juga mengumpulkan data sekunder, berupa data tertulis antara lain Kabupaten Mentawai Dalam Angka, Draf Peraturan Daerah Pengelolaan Terumbu Karang, Laporan Sosial-Ekonomi oleh Critc Daerah Mentawai.. Untuk membuat laporan penelitian ini peneliti juga mencari informasi melalui internet, koran dan berbagai hasil penelitian yang relevan.

1.4. PEMBAKARAN PENULISAN

Secara singkat isi tulisan buku ini dimulai dengan mengemukakan tentang pendahuluan yang isinya mencakup justifikasi permasalahan mengapa melakukan penelitian, tujuan dan bagaimana penelitian ini dilakukan. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran daerah penelitian telah dijelaskan panjang lebar pada bab dua tentang keadaan geografis, potensi sumberdaya baik alam dan sumberdaya manusia atau kependudukan. Adapun program COREMAP dan implementasinya dijelaskan pada bab ke tiga. Uraian tersebut mencakup program dan kegiatan pada tataran kabupaten dan pada tingkat desa. Pada bab ke lima dikemukakan tentang perubahan pendapatan atas dasar hasil survei tahun 2005 dengan hasil survei tahun 2007. Dalam bab tersebut juga dikemukakan tentang faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatan. Selanjutnya pada akhir tulisan buku ini dikemukakan tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PROFIL LOKASI PENELITIAN

Uraian setting lokasi penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan lebih jelas tentang kondisi objektif daerah penelitian. Dengan adanya uraian tersebut maka dapat diketahui informasi yang melatarbelakangi tujuan penelitian yang akan mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat dan permasalahan terumbu karang. Uraian tentang profil lokasi mencakup gambaran tentang keadaan geografis, kondisi sumberdaya alam, sarana-prasarana, dan kelembagaan sosial-ekonomi yang ada di daerah penelitian.

2.1. KEADAAN GEOGRAFIS

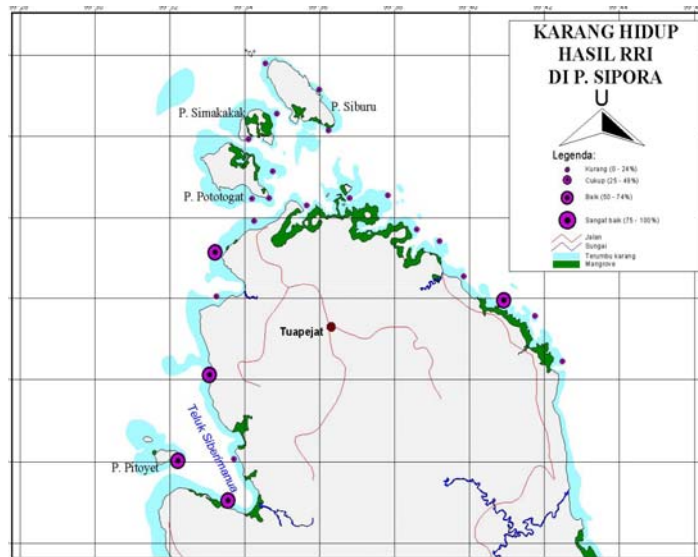
Desa Tuapejat merupakan satu desa pantai yang terletak paling ujung utara di P.Sipora, tepatnya terletak pada $2^{\circ} 10' L S - 2^{\circ} 46,7' LS$ dan $99^{\circ} 35' BT - 99^{\circ} 34,5' BT$. Daerah ini seperti halnya daerah lain di kepulauan sebelah barat P. Sumatera mempunyai resiko tinggi kemungkinan terjadinya gempa bumi yang dapat menimbulkan gelombang tsunami, karena disebelah timur kepulauan Mentawai terdapat sesar atau jalur patahan yang memanjang sekitar 600 km dari wilayah laut barat Lampung kearah utara menuju Aceh. Sesar Mentawai tersebut dikhawatirkan akan dipengaruhi oleh peristiwa gempa 7,9 skala Richter yang terjadi pada tanggal 12 September 2007. Gempa tersebut ternyata telah diikuti puluhan gempa susulan yang telah menimbulkan berbagai kerusakan bangunan di Mentawai, termasuk di Tuapejat. Sejarah menunjukkan bahwa akibat pertemuan lempeng samudera Indo-Australia dengan lempeng Benua Eurasia pada tahun 1797 dan 1833 di daerah tersebut pernah terjadi bencana gempa dan tsunami. Pada saat gempa tahun 1833, pusat gempa berada di daerah P.Pagai.

Desa Tuapejat tersebut terletak di daratan pulau besar Sipora, sebagian merupakan pulau-pulau, yaitu : P. Panjang atau P. Siberu,

P.Rimau atau P. Simakakak, P. Hawera, P.Siteut, P. Pitojat Goisok, P.Pitojat Sabeu, dan pulau karang yang lebih dikenal dengan P. Hantu. Para nelayan dan penduduk asli Mentawai mempercayai bahwa dilokasi pulau karang tersebut memang terdapat jin laut. Lokasi daerah penelitian yang mempunyai laut tersebut, sebagian merupakan teluk yang dipinggirnya ditumbuhi dengan hutan mangrove yang kondisinya masih bagus, dengan variasi lebar kurang satu kilometer dari laut. Dengan adanya pulau-pulau tersebut dan hutan mangrove tersebut, maka telah melindungi daerah tersebut dari gempuran ombak pada saat musim badai yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan “musim anggau”. Masyarakat menyebut musim anggau karena pada saat itu binatang jenis kepiting warna merah yang disebut anggau banyak keluar dari lubang pasir pantai.

Keberadaan hutan mangrove ini harus tetap dipertahankan keutuhannya, sebab manakala ekosistem mangrove mengalami degradasi maka akan segera diikuti oleh proses sedimentasi perairan pantai yang hebat, yang pada ujungnya akan mematikan terumbu karang di perairan pantai Tuapejat. Sangat disayangkan bahwa kebijakan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menempatkan kawasan hutan mangrove ini kedalam status Daerah Peruntukkan Lain. Statusnya yang demikian telah membuka peluang dimanfaatkannya kawasan tersebut untuk keperluan pembangunan fisik kota. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 6 Juni 2007) (wawancara dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 6 Juni 2007) Gejala kearah itu sudah mulai tampak yakni dengan dibangunnya sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan dermaga pendaratan ikan dengan cara membongkar tanaman mangrove.

Peta 2.1.
Peta karang hidup hasil RRI di Tuapejat, Pulau Sipora



Musim pancaroba terjadi selama enam bulan yaitu antara bulan Mei – Oktober. Pada bulan-bulan tersebut daerah kepulauan Mentawai keadaan cuaca seringkali tidak bersahabat, karena banyak terjadi badai kencang yang disertai hujan lebat. Kejadian tersebut tentunya sangat mempengaruhi kegiatan nelayan yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan rumah tangga nelayan. Pada saat itu angin bertiup dari Samudera Hindia menuju daratan P. Sumatera. Di daerah tersebut curah hujan tahunan sangat tinggi yaitu berkisar antara 2.500-4.700 mm dan temperatur harian juga tinggi. Udara yang panas terutama pada siang hari antara lain karena lokasi daerah tersebut berada dekat ekuator. Manakala terjadi badai, gelombang laut dapat mencapai tiga meter, sehingga para nelayan tidak ada yang pergi melaut, bahkan kapal motor yang secara rutin menghubungkan antara pelabuhan Muara Batang Arau di Padang dengan pelabuhan Desa Tuapejat tidak berani berlayar. Kondisi laut yang kadang-kadang tidak bersahabat tersebut dengan sendirinya merupakan kendala bagi aktifitas penduduk bahkan telah mempengaruhi proses pembangunan

di daerah tersebut. Wilayah Desa Tuapejat secara geografis dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

(1) **Wilayah perairan laut.**

Wilayah perairan ini sangat luas di mana terdapat pulau-pulau seperti disebutkan di atas. Pulau-pulau tersebut hampir tidak ada permukiman penduduk, hanya ada pondok sederhana yang hanya ditempati sementara oleh warga Tuapejat untuk keperluan pengelolaan kebun kelapa dan kebun cengkih. Diantara pulau-pulau tersebut dengan daratan P. Sipora terdapat laut yang merupakan teluk, namun mempunyai empat pintu yang menghubungkan dengan laut lepas. Satu pintu pada bagian paling timur yang terdapat mercusuar sebagai rambu alur lalu lintas kapal-kapal antar pulau. Di bagian timur dan selatan wilayah ini merupakan rawa yang mengalami proses pengendapan lumpur dan terpengaruh oleh pasang-surut air laut. Oleh karena itu di daerah ini terdapat hutan mangrove yang luas, memanjang kearah selatan pada bagian timur P. Sipora.

Di seputar perairan terdapat terumbu karang baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Terumbu karang yang berada di luar pulau-pulau tersebut tumbuh melingkar sehingga telah berfungsi sebagai pemecah ombak yang datang dari arah barat laut, sehingga telah menghalangi pulau-pulau tersebut dari gempuran ombak dari Samudera Hindia. Di tempat tersebut yang membentuk ombak secara berturutan dan relatif tinggi, telah dimanfaatkan oleh turis asing untuk berselancar. Untuk memfasilitasi tersebut investor asal Itali sejak tahun 2005 telah membuat rumah-rumah resort di dekat P. Hantu, tepatnya di bagian utara P.Hawera. Di daerah tersebut juga merupakan tempat tujuan utama para nelayan asal Desa Tuapejat menangkap ikan karang, meskipun ombaknya lebih besar daripada ombak di perairan laut bagian dalam. Karena daerah tersebut hasil tangkapan cenderung menurun, nelayan mencari ikan lebih kebarat dari P. Hantu bahkan telah mengarah ke P. Siberut.

(2) Dataran rendah pesisir di P. Sipora.

Dataran rendah yang ada relatif sempit kurang lebih lebarnya hanya 300 meter yang terletak antara pantai laut dengan bukit yang ada di bagian selatan dan bagian timur. Dataran rendah yang sempit dan sebagian masih berawa tersebut bentuknya memanjang kearah barat daya. Karena penduduk cenderung tinggal di dataran rendah maka pola permukiman di Desa Tuapejat mengikuti dataran pantai tersebut, apalagi setelah ada akses jalan. Permukiman tersebut sebagian berada antara jalan dengan laut. Bagian depan rumah-rumah tersebut menghadap jalan sedangkan bagian belakang rumah berada di pinggir laut. Laut telah menjadi tempat pembuangan kotoran domestik rumahtangga, seperti tinja dan sampah, sehingga telah memberi kontribusi terhadap penurunan kualitas perairan laut bagian dalam.

Dengan pola permukiman yang terkonsentrasi sepanjang dataran rendah yang masuk ekologi pesisir, tentunya mempunyai resiko tinggi bila terjadi ancaman tsunami yang diperkirakan akan terjadi, meski belum dapat ditentukan waktu kejadiannya. Gempa yang terjadi tanggal 12 September 2007 meskipun tidak menimbulkan tsunami namun menimbulkan kenaikan air laut. Saat gempa bumi besar terjadi tahun 2004 banyak warga desa yang mengungsi kearah perbukitan, demikian pula pada saat gempa 12 September 2007 dan gempa-gempa susulan. Dalam hal ini jalan-jalan kearah bukit sebaiknya segera dibikin ataupun difungsikan guna mengantisipasi kemungkinan warga desa Tuapejat menghadapi resiko terjadinya gempa-tsunami yang sewaktu-waktu bisa datang.

Pada bagian paling timur permukiman Dusun Tuapejat yang lokasinya berada pada tepi hutan mangrove, terdapat dermaga pelabuhan. Dermaga tersebut telah mengalami kerusakan pada saat gempa tanggal 12 September 2007. Daerah ini pada tahun 70-an merupakan pelabuhan bongkar muat kayu perusahaan HPH. Pada saat itu jumlah rumah yang ada di daerah tersebut baru sekitar 30 rumah. Perusahaan HPH mendirikan barak-barak (camp) perumahan bagi buruh di Dusun Tuapejat, yang saat ini lokasinya disebut Kem, sehingga telah mempercepat pertumbuhan penduduk di daerah

tersebut. Pada saat ini jumlah rumah yang ada sudah mencapai lebih dari 300, sehingga permukiman yang ada nampak padat dan kumuh.

Air tanah yang banyak dipakai untuk kebutuhan rumahtangga penduduk Dusun Tuapejat kondisinya cukup baik, yaitu jernih, tawar dan tidak berbau. Air permukaan yang jernih tersebut karena telah tersaring oleh material pasir. Kedalaman sumur sekitar 1,5 -2 meter dari permukaan tanah. Sumur-sumur yang dimiliki rumahtangga penduduk tersebut ternyata sepanjang tahun tidak pernah mengalami kekeringan. Air sumur yang ada telah dimanfaatkan penduduk untuk sumber air minum, mandi dan mencuci. Di dusun tersebut juga ada sumber air minum yang dikelola oleh perusahaan daerah.

(3) Daerah perbukitan di P.Sipora.

Sebagian wilayah Desa Tuapejat yang berada di P. Sipora mempunyai topografi berbukit, memanjang kearah selatan dengan ketinggian kurang lebih 15 meter dari permukaan air laut. Menurut cerita penduduk, sebelum beroperasinya HPH di daerah tersebut hutan primer yang ada banyak tumbuh meranti, kruing, rotan, kayu gaharu, dan pohon yang menghasilkan getah damar. Awal tahun tujuh puluhan telah dirintis perkebunan kelapa dan cengkik. Pada waktu itu masih didapati fauna jenis burung beo, dan berbagai jenis primata. Namun setelah hutan dieksplotasi oleh HPH daerah tersebut ditumbuhi semak belukar disela-sela tanaman keras. Pada kuruan waktu 70an sampai tahun 1998 di daerah tersebut beroperasi perusahaan kayu PT. Bahari Union, PT. Alam Sumbar dan PT.Mundam Sakti. Setelah itu penduduk memperluas berbagai tanaman keras seperti cengkik, kweni, pinang, pete, dan enau. Daerah perbukitan tersebut nampak tandus dan hanya sedikit yang digunakan untuk permukiman penduduk, kecuali dipinggir jalan utama yang menuju ke kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di kilometer empat dan berlanjut kearah daerah permukiman transmigrasi di SP I. Jalan utama yang saat ini ada sebenarnya merupakan jalan yang dibuat oleh perusahaan HPH pada pertengahan tahun 70-an guna kepentingan transportasi pengangkutan kayu gelondongan yang akan diangkut dari hutan menuju pelabuhan.

Di bagian barat daya Desa Tuapejat permukiman penduduk pinggir pantai yaitu berada di Dusun Mapadegat dan Siberimanua.

2.2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN PENGELOLAANNYA

Pada bagian sub bab ini akan dikemukakan tentang kondisi sumberdaya alam baik sumberdaya laut dan sumber daya yang ada di daratan wilayah Tuapejat dan sekaligus bagaimana masyarakat mengelola sumberdaya tersebut.

2.2.1. Keadaan SDA

Masyarakat di Desa Tuapejat pada dasarnya mempunyai sumberdaya alam yang menjadi sumber kehidupannya yaitu berasal dari lingkungan laut dan dari lingkungan daratan baik di P. Sipora maupun dari pulau-pulau kecil. Sumber daya laut daerah Tuapejat adalah tersedianya berbagai spesies biota laut yang dalam rantai kehidupannya terkait erat dengan terumbu karang dan hutan mangrove.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan dari hasil wawancara baik kepada masyarakat maupun informan kunci, kondisi mangrove di daerah tersebut masih bagus, meskipun akhir-akhir cenderung tergradasi, karena statusnya dapat digunakan untuk penggunaan lain. Dilihat dari aspek hukum keberadaan hutan mangrove dapat terancam karena dapat alih fungsi untuk penggunaan lain. Meskipun demikian saat ini hutan mangrove kondisinya masih lebat, mempunyai lebar dari laut sampai daratan dapat mencapai 1 Km, dan memanjang pada pantai timur P. Sipora. Keberadaan hutan mangrove tersebut sangat bermanfaat dilihat dari kepentingan pelestarian ekologi di daerah pesisir. Hutan mangrove yang masih dalam kondisi baik antara lain karena belum mengalami akibat dari tekanan penduduk. Di tempat tertentu sudah ada yang ditebang karena digunakan untuk penggunaan lain. Meskipun demikian dari sumberdaya alam mangrove tersebut sebagian penduduk telah memanfaatkan biota dari ekosistem tersebut antara lain jenis moluska yang oleh masyarakat setempat disebut lilit, kepiting dan udang. Hutan mangrove tersebut merupakan tempat

bertelurnya udang, moluska dan ikan. Di tempat tersebut juga menjadi tempat bagi beberapa spesies burung dan ular. Di samping itu sebagian kayu bakau telah dimanfaatkan sebagai tiang pancang di pinggir laut.

Adapun sumberdaya laut di perairan Tuapejat antara lain terdapat jenis biota :

- ikan kerapu
- ikan todak
- ikan ramung
- ikan gabur
- ikan pari
- udang
- teripang
- gurita
- ikan kembung
- ikan tenggiri
- kepiting
- ikan kakap, dan
- berbagai jenis ikan hias.



Gambar 2.1. Sumber daya laut yang ditangkap nelayan Tuapejat

2.2.2. Wilayah Pengelolaan

Nelayan-nelayan tradisional yang menggunakan perahu dayung dan perahu motor tempel selain digunakan untuk mengangkut hasil pertanian seperti cengkih, kelapa, pisang, sambil pulang mereka mencari ikan di perairan antara P. Buru dan Desa Tuapejat. Hasil tangkapan mereka hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk atau lazim disebut istilah setempat “mencari sambal”.

Nelayan-nelayan tradisional lainnya yang mengoperasikan perahu pompong, perahu motor tempel yang mengoperasikan kompresor, melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Gosong I, Gosong II, dan Gosong III, yang terletak di sebelah Timur P. Setan. Kawasan perairan ini memang merupakan lokasi penangkapan ikan (fishing ground), baik bagi nelayan setempat, maupun nelayan dari luar seperti Sibolga dan Bengkulu yang mengoperasikan pukat cincin bertonase besar antara 70 GT – 150 GT. Sering pula kapal-kapal ikan tersebut mengoperasikan pukat harimau, dan tidak segan-segan melakukan pemboman di perairan Gosong III. Bagi nelayan setempat yang mengoperasikan kompresor sebagai alat bantu penyelaman, biasanya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium.

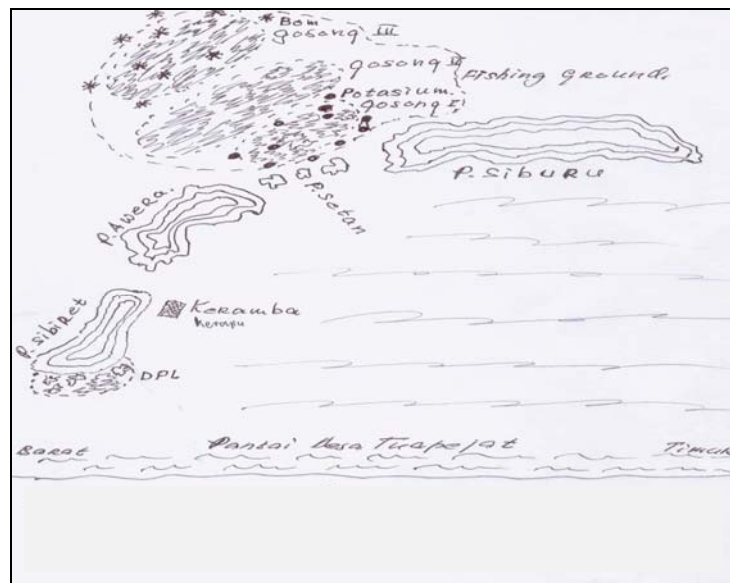
Untuk mencapai lokasi tersebut, dari Desa Tuapejat menggunakan perahu motor tempel berkekuatan mesin 8 PK memakan waktu tempuh seklitar 1 – 2 jam, tergantung kondisi cuaca, gelombang, dan arus. Kedalaman perairan Gosong I sekitar 12 m, Gosong II 15 m, dan Gosong III lebih dari 20 m. Dasar perairan ini berupa terumbu karang yang kondisinya sudah rusak. Jenis sasaran tangkap di perairan ini adalah ikan kerapu dan lobster.

Konsentrasi penangkapan ikan pada lokasi perairan yang sama, sasaran tangkap yang sama, dengan pengoperasian alat tangkap yang berbeda tingkat kemampuan eksploitasinya, telah mengakibatkan terjadinya konflik. Kasus pengusiran nelayan Sibolga oleh nelayan setempat di wilayah perairan ini sering terjadi.

Keberadaan berbagai jenis biota laut tersebut terkait erat dengan keberadaan terumbu karang yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dibuat oleh para nelayan yang mengikuti *focus group discussion* nampak bahwa penyebaran terumbu karang yang masih hidup sebagian berada di perairan dalam dan sebagian besar di perairan laut luar.²

Peta 2.2.
Peta Sumber Daya Laut yang Dibuat Nelayan



Sumber: Informasi Renold Mantan Pekerja Penambang Pasir dan Pengambil Batu Karang, 11 Juni 2007.

Kondisi sumber daya daratan, berupa ketersediaan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan dan pertanian pangan. Kebun-kebun yang dimiliki masyarakat Tuapejat berupa tanaman kelapa, pinang, pala, sagu, tanaman cengkih, pete dan berbagai tanaman keras. Tanah perkebunan rakyat tersebut berada di

² Yang dimaksud laut perairan dalam ialah yang lokasinya berada antara pulau-pulau dengan daratan P. Sipora. Adapun perairan luar bila lokasinya pada sisi luar pulau-pulau ke arah laut lepas.

daratan P. Sipora, dan di daratan pulau-pulau kecil. Tanaman perkebunan yang sudah lama ditanam tersebut lokasinya berada dari pantai sampai puncak lahan perbukitan. Hasil dari perkebunan kelapa milik keluarga umumnya diolah menjadi kopra yang selanjutnya dibeli tengkulak untuk dibawa ke kota Padang. Sebagian hasil juga diolah sendiri untuk minyak kelapa. Demikian pula hasil cengkik yang dipanen sekali setahun, setelah dijemur kemudian juga dipasarkan kepada pengumpul yang selanjutnya dibawa ke Kota Padang.

Sebagian lahan daratan juga digarap untuk tanaman semusim seperti padi, umbi-umbian, dan berbagai jenis tanaman sayuran. Hasil dari tanaman semusim tersebut sebagian dipasarkan di desa setempat. Tanaman semusim di Desa Tuapejat sebagian diproduksi oleh transmigran asal Jawa, namun jumlahnya masih terbatas sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang ada. Oleh karena untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah di Desa Tuapejat masih harus mendatangkan dari daratan Sumatera Barat yang umumnya dibawa oleh beberapa pedagang asal kota Padang. Jenis sayuran dan buah yang umumnya datang dari kota Padang antara lain cabe merah, tomat, wortel, buncis, terung, kol, jeruk, dan salak. Komoditi tersebut umumnya dibawa langsung oleh para pedagang. dengan kapal kayu yang secara rutin berlabuh di pelabuhan Tuapejat. Sayuran dan buah yang datang dari kota Padang tersebut sebagian dijajakan di lingkungan pelabuhan, dan sebagian dijual secara berkeliling dengan menggunakan kereta dorong.

Hutan di daerah tersebut sudah hampir tidak ada, sehingga nelayan yang sering membuat sampan merasa kesulitan memperoleh kayu lokal, termasuk hilangnya pohon meranti, keruing, karai, katuko dan manau. Hancurnya ekosistem hutan di daerah tersebut pada saat masih beroperasinya HPH. PT Bahari Union pada tahun 70an yang kemudian diikuti oleh kegiatan illegal logging. Pada waktu dusun Tuapejat belum ada, dan tempatnya dijadikan camp-camp perusahaan kayu, dan pelabuhan yang saat ini ada saat ini merupakan tempat pelabuhan kayu milik perusahaan tersebut. Keberadaan perusahaan kayu tersebut ternyata telah menjadi daya tarik masuknya pendatang atau perantau dari luar Sipora, terutama dari daratan Sumatera Barat.

Oleh karena orang Minang banyak bermukim di daerah tersebut hingga saat ini, apalagi setelah ibukota Kabupaten Mentawai berada di lingkungan Desa Tuapejat.

2.2.3. Teknologi Penangkapan

Nelayan Tuapejad berdasarkan jenis perahu, wilayah tangkap, dan alat tangkap yang digunakan tergolong pada kategori nelayan tradisional. Sesuai dengan SK Menteri Pertanian No: 607/KPTS/UM/9/1976 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan yang diperbaharui pada tanggal 5 April 1999 dengan Keputusan Menteri Pertanian No: 392 Tahun 1999 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan. Dalam SK Menteri Pertanian tersebut dinyatakan bahwa jalur I terbagi atas perahu nelayan tradisional tanpa mesin antara 0–3 mil, dan perahu nelayan tradisional berbobot 5 GT untuk kapal motor tempel. (Lihat Sudirman Saad, 2003, 99). Acuan berikutnya adalah Pasal 10 ayat 3 UU No: 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi UU No : 32 tahun 2004 tentang Pemewrintah Daerah, disebutkan bahwa wilayah tangkap nelayan tradisional berada pada 4 mil laut dari garis pantai, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Menilik dari jenis alat tangkap yang digunakan hanya berupa pancing dan jaring karang dengan tingkat eksploitasi yang rendah, ukuran bobot perahu yang rata-rata dibawah 5 GT, maka jelas bahwa nelayan Desa Tuapejat adalah masuk dalam kategori nelayan tradisional.

Jenis alat tangkap yang digunakan serta sasaran tangkap meliputi pancing rawai, pancing ulur atau lazim disebut conpoi, sasaran tangkapnya adalah ikan karang, pancing maranggung, sasaran tangkapnya ikan kerapu, dan pancing ambun yang dilengkapi dengan bulu-bulu benang emas dan pemberat dari batu. Alat tangkap ini dioperasikan dengan cara menghentakkan tali pancing ke atas, dan saat dihentakkan pemberat batu terlepas. Saat pemberat batu terlepas, pancing dengan kilauan bulu emas yang bergerak melayang-layang merangsang ikan untuk menyambarnya. Sasaran tangkap pancing ini adalah semua jenis ikan karang.

Nelayan tradisional yang lain mengoperasikan kompresor sebagai alat bantu selam, melakukan penangkapan dengan pemotasan. Sasaran tangkapnya adalah udang lobster, ikan kerapu, gurita, dan ikan lainnya. Sepintas keberadaan nelayan kompresor memang sulit diketahui. Mereka beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Tidak diketahui pula bagaimana mereka mendapatkan potasium tersebut. Dahulu potasium ini dijual secara bebas di kios-kios dan warung-warung terdekat. Kini jaringan peredaran potas semakin sulit untuk diketahui oleh masyarakat awam. Di daerah ini terdapat 3 orang nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium.

Kapal motor tempel yang digunakan pengoperasian kompresor dioperasikan oleh sejumlah 5 orang. Pembagian tugasnya 2 orang melakukan penyelaman dan pemotasan, 2 orang menjaga kompresor dan ikan dalam bak di tengah perahu, dan 1 orang menjaga kemudi perahu. Hasil tangkapan setelah dikurangi biaya operasional “rangsum”, kemudian sisanya dibagi 6. Sebagai pemilik alat tangkap, Toke mendapat 1 bagian, dan 5 bagian untuk nelayan yang mengoperasikan, masing-masing mendapat 1 bagian.

Praktik penangkapan ikan dengan menggunakan potasium ini, memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, baik bagi si pelaku pemotasan, maupun bagi konsumen. Bagi pelaku pemotasan, resiko yang sering dialami adalah kram badan, lumpuh, dan muntah darah. Hal ini disebabkan baik oleh karena kekurangan oksigen pada kedalaman tertentu dengan suhu air laut yang dingin, maupun akibat keracunan potas. Di Desa Tuapejat terdapat 2 orang kurban yang mengalami kelumpuhan. Sungguh pun demikian belum ditemukan kajian medis di Desa Tuapejat menyangkut aktivitas penyelaman dan pembiusan ikan dengan menggunakan potasium.

2.2.4. Sarana dan Prasarana

Secara umum yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah semua barang baik yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak baik milik pemerintah maupun non-pemerintah yang dapat menunjang proses pembangunan. Dalam konteks penelitian ini uraian

tentang sarana dan prasarana dibatasi pada hal-hal yang relevan dengan isu pengelolaan sumberdaya laut.

Saat ini Desa Tuapejat mempunyai aksesibilitas yang paling baik dibandingkan desa-desa lain di P.Sipora. Desa ini mempunyai akses transportasi laut yang lancar dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu kota Padang. Untuk menghubungkan Desa Tuapejat dengan kota Padang, dengan Sipora dan dengan Siberut terdapat kapal, antara lain Km. Beriloga, Km. Sumber Rezeki (milik swasta), Km. Usaha Baru, Km.Simasin, .dan MV. Mentawai Ekspres (milik Pemda), serta kapal ASDP yaitu Km Ambu-ambu . Kapal Mentawai Ekspres tersebut. adalah kapal cepat dengan daya tampung terbatas. Body kapal terbuat dari *fiberglass* yang dapat menempuh pelayaran dari Padang ke pelabuhan Tuapejat hanya dalam tempo 4 jam. Adapun kapal yang lain adalah kapal kayu dengan kapasitas penumpang kurang lebih 250 orang, belum termasuk muatan barang. Dengan kapal kayu tersebut waktu tempuh palayaran bila langsung dari Dermaga Muara Batang Aur atau pelabuhan Bungus di Padang ke pelabuhan Tuapejat adalah sekitar 10 jam. Pada umumnya kapal berangkat sore hari dan sampai pagi hari. Kapal yang ada tersebut umumnya sarat penumpang. Hal ini mengindikasikan adanya mobilitas penduduk yang tinggi antara Tuapejat- Padang, antara lain banyak pegawai daerah yang sering pulang ke Padang setelah gajian atau alasan tugas keluar kabupaten.

Untuk meningkatkan kapasitas kegiatan pelabuhan dermaga beton di Dusun Tuapejat telah diperluas dan direnovasi sejak tahun 2000, sejalan dengan pembangunan kompleks perkantoran ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada saat membangun dermaga ini, material batu terpaksa didatangkan dari daratan P.Sumatera, karena di P. Sipora sendiri tidak ada deposit batu gunung yang berkualitas. Batu gunung yang didatangkan dari P. Sumatera tersebut diangkut dengan kapal jenis ferry Roll and Roll Off (Roro). Kapal ini juga telah berfungsi membawa barang-barang dalam jumlah besar dan berat seperti mobil, traktor, mesin pembangkit listrik, dan lain-lain. Pada saat penelitian ini berlangsung tahun 2005 kapal jenis ini sedang mengalami kerusakan sehingga belum dapat beroperasi, namun pada saat penelitian tahun 2007 kapal tersebut telah aktif

beroperasi. Sebelumnya ada perbaikan pelabuhan, kapasitas dermaga ini masih sederhana, karena merupakan dermaga yang dioperasikan sejalan dengan kepentingan bongkar-muat kayu milik tiga HPH. Pada saat ini kendati jumlah sarana dan prasarana perhubungan laut mengalami kemajuan namun dilihat dari jumlah maupun kualitasnya belum mampu untuk mengakomodasi perhubungan antar pulau secara optimal, apalagi pertengahan September 2007, dermaga kapal Tuapejat, Sikakap dan Muara Siberut mengalami kerusakan akibat gempa.



Gambar 2.2. Pelabuhan Tuapejat

Di samping itu kondisi geografi wilayah telah menjadi kendala terhadap kelancaran transportasi. Bahkan masyarakat Tuapejat masih mengalami kendala untuk menuju kota kecamatan di Sioban yang jaraknya 20 mil laut. Sampai saat ini belum ada akses transportasi darat yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan

desa Tuapejat, sehingga ketersediaan kapal dan *speet boat* merupakan satu-satunya alat transportasi. Untuk memperlancar transportasi antara P. Sipora dengan kota Padang sejak tahun 2001 sedang dibangun kembali lapangan terbang perintis Rokot yang terletak di Km.25. Saat ini lapangan terbang tersebut telah selesai, dan penerbangan secara rutin 3 kali seminggu telah dilakukan. Pesawat terbang dengan rute Padang-Rokot tersebut hanya mempunyai kapasitas 20 penumpang. Untuk mencapai ibukota kabupaten penumpang pesawat terbang harus melanjutkan perjalanan lewat laut menuju pelabuhan Tuapejat. Untuk mendukung pembangunan bandar udara tersebut dibangun pula jalan darat tembus menuju kompleks ibu kota kabupaten, meskipun sampai pertengahan tahun 2007 belum selesai.

Prasarana perhubungan darat yang ada di Dusun Tuapejat adalah jalan yang menghubungkan pelabuhan ke arah barat, melewati

daerah Jati, dan jalan dari pelabuhan ke arah selatan P. Sipora bagian pantai timur lewat kompleks perkantoran kabupaten. Pada tahun 2005 jalan ke arah barat merupakan jalan yang menelusuri pantai dengan lebar hanya 6 meter, dengan kondisi jalan tanah yang berbatu. Pada tahun 2006, jalan tersebut kondisinya sudah bagus karena telah dicor dengan semen mulai dari pelabuhan. Sebagian batu yang digunakan untuk pengerasan jalan adalah karang mati hasil penggalian di laut. Adapun jalan aspal ke arah selatan pada pinggir bukit P. Sipora dengan lebar 10 meter. Pada saat penelitian ini berlangsung Juli 2007, kondisi jalan tersebut dalam kondisi rusak berat dan akan diperbaiki setelah anggaran turun dan setelah melalui proses tender. Dengan adanya jalan tersebut telah memperlancar transportasi darat. Kendaraan umum bis belum ada. Adapun transportasi yang ada baru dari jenis mobil plat hitam jenis truk, Toyota Kijang dan Mitsubishi L.300, serta kendaraan ojek milik perorangan. Pada awal tahun 2007, telah ada 15 mobil angkutan umum. Jenis kendaraan ini telah dimanfaatkan pegawai, pedagang, dan anak sekolah SMP dan SMA yang sekolahnya kurang lebih 6 Km dari Dusun Tuapejat. Adapun untuk pegawai Pemda yang banyak bertempat tinggal di Dusun Tuapejat umumnya mereka memperoleh fasilitas motor, mobil dinas dan kendaraan bis dinas.

Desa Tuapejat mulai berkembang secara nyata sesudah tahun 1999, sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ibukotanya berada di Desa Tuapejat. Hal ini telah membawa pengaruh makin lengkapnya sarana dan prasarana di daerah tersebut. Prasarana listrik milik PLN dan telepon Perumtel dan seluler sudah ada di daerah tersebut. Keberadaan prasarana tersebut telah memperlancar akses komunikasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menunjang kegiatan ekonomi, pemerintah daerah telah membangun pasar di SP II, dan membangun sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Ke dua sarana ekonomi ini menjadi tidak berfungsi, oleh karena letaknya yang jauh dari aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Di Dusun Jati terdapat 1 buah pasar berlokasi di tengah-tengah permukiman penduduk yang ramai dikunjungi penduduk setiap hari. Pasar ini dibangun secara swadaya oleh seorang

anggota masyarakat setempat pada tahun 2004. Selain pasar terdapat 3 tempat lokasi pendaratan ikan, ujudnya berupa bangunan lapak beratap plastik yang disangga dengan tiang-tiang kayu sekedarnya. Di bawahnya terdapat meja berupa papan-papan yang disusun rapi, berfungsi sebagai tempat meletakkan ikan yang baru dibeli dari nelayan. Di tempat lapak-lapak ini, terdapat antara 2 – 3 orang pedagang ikan yang menggelar dagangannya di pinggir jalan. Sarana ekonomi lainnya berupa kios-kios, toko-toko, warung makan, konter HP, Wartel, bengkel kecil-kecilan yang menerima perbaikan kerusakan mesin ringan. Hampir semua sarana ekonomi ini dimiliki oleh penduduk pendatang dari Sumatera Barat. Selain sarana tersebut, terdapat sebuah lembaga keuangan pemerintah berupa Bank Nagari yang buka setiap hari melayani masyarakat.

Prasarana dan sarana di bidang kesehatan yaitu adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terletak di Km.3 belok kearah barat yaitu di Dusun Mapedegat. Puskesmas yang ada saat ini relatif baru, karena Puskesmas lama yang ada di Dusun Tuapejat telah ditutup. Perkembangan Puskesmas tersebut telah membawa dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pasien yang berobat ke Puskesmas tersebut umumnya menderita malaria dan infeksi saluran pernafasan atas (Espa). Untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat, pada saat ini di daerah tersebut telah selesai dibangun Rumah Sakit.

Pada tahun 2000, pernah ada pasien yang berobat akibat ledakan bom ikan yang berasal dari kapal ikan ilegal yang berasal dari daerah Sibolga. Untuk penjegahan penyakit malaria dan pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu, di Dusun Tuapejat terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat asal Australia bernama “Surf Aid International ” yang ikut berpartisipasi, antara lain memberi bantuan kelambu. Bantuan kelambu untuk masyarakat juga diberikan di Sikakap. Masyarakat Dusun Tuapejat yang umumnya berasal dari etnis Mentawai dan etnis Minangkabau memiliki akses tempat beribadah berupa gereja dan masjid. Gereja di daerah tersebut pada dasarnya adalah Gereja Kristen (4 buah) dan Gereja Katholik (2 buah). Jumlah masjid sebanyak 2 buah.

Penduduk Tuapejat dalam berbelanja sehari-hari telah tersedia warung-warung di sepanjang jalan, bahkan telah ada pasar yang dibuat oleh salah seorang warga. Pasar tersebut dibuat karena untuk menampung pedagang di kompleks pelabuhan digusur karena gubernur mau datang. Setelah itu pedagang sayur yang biasa berjualan di kompleks pelabuhan kembali berjualan, terutama pada saat ada kapal masuk. Toko dan warung di daerah tersebut antara lain menyediakan bahan bangunan, perabot, barang kelontong, foto copy, dan warung makan. Selain itu di Desa Tuapejat terdapat dua wisma atau losmen tempat penginapan yang lokasinya di dekat pelabuhan laut.

Permukiman penduduk memanjang di kanan kiri jalan yang sudah dicor semen. Bangunan permanen berbentuk kios dan pertokoan di sepanjang tepi jalan umumnya dihuni oleh penduduk migran dari Sumatera Barat, sedang permukiman penduduk asli Mentawai berada pada bagian belakang, membentuk kantong-kantong permukiman. Rumah-rumah penduduk asli Mentawai umumnya berupa bangunan semi permanen, berlantai tanah, setengah dinding batu, setengah dinding papan, dan beratap daun rumbia. Lainnya masih berbentuk rumah panggung, bahkan rumah adat berbentuk rumah panggung panjang milik tua-tua adat suku 'Katubo Oinan' masih tampak kokoh. Letak rumah tidak teratur, menempati tanah berawa dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk.

Dibangunnya got saluran air agar dapat mengalirkan air yang selalu menggenangi permukiman penduduk pada bagian belakang, tetap saja tidak dapat mengubah keadaan. Selokan-selokan penuh sampah, dan permukiman penduduk tetap tergenang air, becek, kotor berserakan dengan sampah. Kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat dan belum tertanamnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena memperbaiki lingkungan permukiman merupakan persoalan yang mendesak untuk ditangani. Beberapa penyakit yang sering diderita masyarakat seperti ISPA, penyakit kulit gatal-gatal, batuk, tipus, kolera, desentri, dan malaria, memiliki korelasi dengan buruknya kondisi sanitasi lingkungan permukiman penduduk.

Permukiman penduduk pendatang dengan penduduk asli Mentawai tampak cukup mencolok. Bagi masyarakat asli Mentawai, memiliki rumah permanen adalah merupakan hal yang sangat diidamkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi rumah tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi sekaligus mencerminkan status sosial bagi penghuninya. Kebesaran adat rumah panjang sebagai status simbol sosial, kekuasaan dan budaya Mentawai telah digantikan oleh bangunan rumah tinggal permanen yang kokoh, gemerlap dengan seisi perabotan rumah tangga yang baru lengkap dengan barang-barang elektroniknya seperti TV, tape, Vidio, Kulkas, telah menjadi status simbol sosial ekonomi yang baru. Berlangsungnya interaksi sosial yang berjalan sangat intensif melalui kontak-kontak budaya telah mengakibatkan berubahnya “*culture focus*” masyarakat Mentawai. Dengan kata lain, masyarakat Mentawai telah memilih jalannya sejarah sendiri, dan menentukan pilihan budayanya sendiri. Menganjurkan kepada mereka untuk kembali kepada kebesaran rumah panggung, hanyalah suatu nostalgia, atau bahkan mungkin bisa ditafsirkan sebagai tindak menghalangi hak sejarah mereka dan bisa mengusik rasa ketidakadilan. Persoalan muncul justru pada saat penduduk asli Mentawai mengidamkan pemilikan rumah permanen yang terbuat dari bahan material batu karang dan pasir laut, tetapi pada saat yang bersamaan dikeluarkan kebijakan pelarangan pengambilan batu karang dan pasir laut melalui Peraturan Desa (Perdes) yang diperkuat dengan SK Bupati dan menyusul dengan keluarnya Perda yang masih dalam proses penyelesaian.

Belum berhasilnya program COREMAP menyediakan bahan material bangunan pengganti batu karang dan pasir laut, serta masih kuatnya pandangan masyarakat bahwa hanya material tersebut yang dianggap kuat dan murah, menjadikan upaya penyelamatan terumbu karang masih menghadapi ancaman yang serius, meskipun volume pengambilan bahan tersebut sudah mulai menurun sehubungan dengan keluarnya aturan larangan tersebut. Tetapi seberapa lama aturan ini dipatuhi masyarakat, akan sangat ditentukan oleh cepat dan lambatnya penemuan bahan material alternatif pengganti yang bisa diterima masyarakat.

2.2.5. Program dan Kegiatan dalam Pengelolaan SDL

Selain terumbu karang dan pasir laut sebagaimana telah diuraikan di atas, perairan Desa Tuapejat sangat kaya dengan sumber daya laut lainnya. Berbagai jenis ikan karang dapat ditemukan, udang lobster, kepiting bakau, teripang, dan belakangan gurita telah dieksploitasi dan dijadikan sebagai bahan komoditas ekspor, terutama bagi para pedagang ikan. Sementara itu bagi penduduk asli Mentawai pemanfaatan mereka masih sebatas hanya sebagai bahan kebutuhan lauk pauk sehari-hari.

Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dijual kepada sejumlah penampung. Di desa ini terdapat sejumlah 5 orang penampung, salah satu penampung terbesar adalah ibu Butet. Jenis kerapu merah (kerapu macan) dalam keadaan hidup dibeli dengan harga Rp 60.000 per kg. Jenis kerapu tikus berwarna coklat bintik-bintik hitam dibeli oleh penampung dengan harga antara Rp 50.000 - Rp 60.000 . Penampung menjual kepada pedagang di Padang dengan harga Rp 105.000 untuk kerapu merah, dan Rp 80.000 - Rp 100.000 untuk kerapu tikus. Dalam keadaan mati, kerapu merah dijual dengan kisaran harga antara Rp 12.500 - Rp 15.000 per kg. Kisaran harga ikan kerapu tikus antara Rp 8000 - Rp 9000. Bila tidak terjual, ikan-ikan tersebut dibuat ikan asin, harga jual setempat Rp 35.000 per kilogram.

Berbagai jenis udang lobster juga dijual kepada penampung. Udang lobster jenis udang batu berwarna coklat, dibeli penampung dengan harga Rp 60.000 per kg dalam keadaan masih hidup, dan dijual di Jakarta Rp 125.000 per kg. Udang-udang lobster jenis udang pasir berwarna coklat dibeli oleh penampung dalam keadaan masih hidup Rp 70.000 per kg, dijual di Jakarta Rp 150.000 per kg. Jenis udang lobster mutiara dibeli dari nelayan dalam keadaan masih hidup sekitar Rp 100.000 per kg, dan dijual di Jakarta Rp 200.000 per kg. Jenis udang lobster yang berwarna biru kehijau-hijauan dibeli dari nelayan dalam keadaan masih hidup per kg antara Rp 75.000 - Rp 80.000, dijual di Jakarta Rp 100.000 - Rp 130.000.

Dilokasi penampungan ikan milik ibu Butet, tidak ditemukan teripang, dan kepiting bakau. Usaha penampungan ikan didominasi

oleh ikan kerapu dan lobster. Ikan kerapu dan lobster dari nelayan setelah sampai ditempat penampungan dibersihkan dengan air bersih, disuntik dengan obat penawar potasium, kemudian ditampung dalam bak-bak penampung yang sudah dilengkapi dengan alat sirkulasi air. Jenis tangkapan lain yang dipasarkan di pasar regional akhir-akhir adalah gurita. Gurita dijual dalam keadaan beku, dikemas dalam kotak plastik, kemudian dikirim ke Padang, Medan, Bengkulu dan Jakarta. Harga per kg gurita yang sudah dikeringkan dan dikemas dalam plastik di pasar Bengkulu Rp 70.000.

Ikan-ikan lainnya seperti tongkol, gebur, tenggiri, kakap merah, dan cakalang, dimasukkan kedalam kotak plastik berukuran bobot 130 kg. Biaya pengiriman per kotak mencapai Rp 200.000 sampai di Padang. Dalam 1 minggu pengiriman ikan ke Padang berlangsung antara 2 – 3 kali. Tiap kali pengapalan berjumlah antara 5 – 10 peti, tergantung pada banyak sedikitnya hasil tangkapan. Nilai uang nominal dalam satu kali pengapalan antara Rp 250.000.000 - Rp 300.000.000. Sering kali ditemukan bahwa penampung-penampung besar juga menjual ikan konsumsi kepada pedagang-pedagang eceran.

Selain menampung dari hasil tangkapan nelayan, penampung besar juga merangkap menjadi Toke, yang mengoperasikan sejumlah perahu pompong. Seperti ibu Butet, ia mengoperasikan 3 buah perahu pompong untuk menunjang usahanya, 2 buah perahu dioperasikan untuk menangkap ikan, lama operasi penangkapan antara 5 – 7 hari, 1 buah perahu pompong yang lain digunakan untuk memburu tangkapan ikan kerapu dan udang lobster yang dilakukan nelayan lain.

Bagi hasil yang diterapkan pada nelayan pompong adalah bagi 4, setelah dikurangi biaya operasional dan makan (ransum). Biaya melaut terdiri dari minyak, rokok, dan makan. Selaku pemilik perahu dan peralatan tangkap, Toke mendapat 1 bagian, 3 orang nelayan yang lain mendapat 3 bagian. Bila hasil tangkapan tidak dapat menutup biaya operasional, maka seluruh pengeluaran akan menjadi tanggungan Toke. Usaha penampungan ikan di Desa Tuapejat memang ditunjang dengan kegiatan pengawetan, pengemasan, pemeliharaan sementara yang menggunakan teknologi

maju dan melibatkan modal yang tidak sedikit. Hanya orang-orang yang tergolong kaya dan memiliki jaringan pemasaran yang luas yang bisa menekuni usaha ini.

Bagi nelayan kebanyakan, dengan tidak adanya fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), menjadikan harga pasaran ikan cenderung ditentukan secara sepihak oleh sejumlah kecil penampung dan pedagang eceran, sehingga terjadi ketidakpastian harga. Untuk mendapatkan kepastian harga, melindungi konsumen, dan untuk meningkatkan daya tawar nelayan (*bargaining position*), dibangunlah TPI, tetapi sangat disayangkan TPI yang ada belum dapat difungsikan karena letaknya yang jauh dari aktivitas kenelayanan.

2.3. KEPENDUDUKAN

Sub bab ini berisi uraian tentang gambaran kondisi dan dinamika penduduk dengan fokus utama Dusun Tuapejat. Pembahasan mencakup kondisi obyektif baik kuantitas, komposisi maupun kualitas penduduk, termasuk kesejahteraan mereka. Uraian ini sangat penting untuk dikemukakan karena latar belakang penduduk terkait erat dengan isu kerusakan terumbu karang yaitu sebagai subyek dan sekaligus obyek pengeloaan. Uraian pada bagian ini didasarkan atas data survei tahun 2007 serta hasil diskusi.

2.3.1. Jumlah dan Komposisi

Dalam pertengahan tahun 2005, jumlah penduduk di Desa Tuapejat mencapai 2.235 jiwa, dimana sebanyak 1220 jiwa berada di Dusun Tuapejat. Dilihat dari komposisi menurut etnis, 80% adalah etnis Mentawai, 14% etnis Meningkabau, dan sisanya adalah etnis lain antara lain Batak, Jawa dan Nias. Dilihat dari struktur penduduk menurut jenis kelamin dari data survai tahun 2007 menunjukkan adanya rasio jenis kelamin sebesar 105. Ini berarti bahwa tiap 100 perempuan di desa Tuapejat terdapat 105 penduduk laki-laki. Proporsi penduduk laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan merupakan indikasi adanya migrasi neto positif di Dusun Tuapejat. Pada umumnya penduduk laki-laki cenderung melakukan migrasi ke

Tuapejat, karena sejak 3 dasawarsa terakhir penduduk dari daratan Sumatera Barat mulai masuk ke Tuapejat. Jumlah migran yang umumnya etnis Minangkabau, mengalami peningkatan sejak tahun 2000 sejalan dengan ditetapkannya lokasi ini sebagai ibukota kabupaten. Orang minang tersebut juga banyak merantau ke Desa Sikakap, karena desa tersebut menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Pagai Utara Selatan dan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Tabel 2.1.
Komposisi Penduduk Dusun Tuapejat Menurut Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2007

Kelompok umur	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
0 - 4	5,9	6,6
5 - 9	13,1	11,5
10 - 14	7,6	13,7
15 - 19	13,1	12,8
20 - 24	13,1	9,7
25 - 29	7,2	8,8
30 - 34	5,1	6,2
35 - 39	7,2	7,5
40 - 44	6,8	7,5
45 - 49	5,1	6,6
50 - 54	6,8	4,4
55 - 59	3,8	2,6
60 - 64	2,1	0,9
65 +	3,0	1,3
Jumlah	100,0	100,0
N	236	227

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

Penduduk etnis Mentawai yang mendominasi penduduk P.Sipora, menurut penuturan warga setempat asal mulanya juga pendatang yang datang dari P.Siberut. Mereka berasal dari suku kecil yang mengalami konflik dengan suku besar di Siberut, sehingga untuk menghindari terpaksa mengungsi menyeberang laut kearah pegunungan di P.Sipora. Sejak tahun 50-an mereka mulai turun gunung, antara lain menuju Tuapejat setelah ada pengaruh penginjil di daerah tersebut. Mulai tahun 70-an beberapa pemuda Mentawai di

Desa Tuapejat mulai sekolah keluar pulau untuk melanjutkan pendidikan terutama ke Padang dan Sumatera Utara. Penduduk Mentawai yang berada di Dusun Tuapejat berasal dari suku Toinan, Tatubeket dan Siritoitet. Penduduk etnis Mentawai tersebut meskipun punya suku, punya lahan adat, tetapi tidak mempunyai persatuan suku.

Hasil survei yang dilakukan pada bulan Juli 2007, menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Dusun Tuapejat sebesar 4,6 jiwa. Tiap runahtangga kurang lebih ada suami-istri dan tiga orang anak yang tinggal bersama. Dari Tabel 3.1 dapat dihitung rasio ketergantungan yaitu sebesar 46. Ini berarti bahwa dari 100 orang yang usia produktif (15-64 tahun) menanggung 46 penduduk yang belum dan tidak produktif yaitu umur di bawah 15 tahun dan mereka yang berumur di atas 64 tahun. Rasio beban ketergantungan tersebut tergolong rendah sehingga secara ekonomis tidak terlalu membebani mereka yang masuk usia kerja produktif. Atas dasar komposisi penduduk menurut umur dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk tua akan terjadi sekitar 45 tahun mendatang, karena makin naiknya harapan hidup sehingga struktur penduduk yang menonjol pada usia sekitar 10-24 tahun saat ini akan menjadi umur tua.

Dari data struktur umur terlihat bahwa persentase yang menonjol berada antara 15-24 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Mereka ini adalah kelahiran pada kurun waktu tahun 80-an. Hal ini menunjukkan bahwa fertilitas penduduk pada kurun waktu 80-an tersebut adalah tinggi yang kemudian mengalami penurunan sesudah itu. Pada saat ini kebanyakan dari mereka masih sekolah, meskipun sudah ada yang bekerja bahkan ada yang menjadi pengangguran baik yang tidak mencari kerja maupun yang mencari kerja (14,7%).

Tabel 2.2.
Penduduk Dusun Tuapejat Usia 6 Tahun Keatas,
Menurut Kegiatan Utama yang Dilakukan dan Jenis Kelamin,
Tahun 2007

Kegiatan utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Bekerja	55,8	11,4	34,0
Menganggur/tidak mencari kerja	7,9	4,3	6,1
Mencari kerja	13,7	3,3	8,6
Sekolah	22,1	32,6	27,3
Mengurus rumahtangga	0,0	46,4	23,8
Lainnya	0,5	0,0	0,3
Jumlah	100,0	100,0	100,0
N	190	184	374

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

Persentase penduduk usia 6 tahun ke atas yang masih sekolah ternyata untuk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki masing-masing 22,1 % dan 32,6 %. Namun, pada umur yang lebih tinggi yaitu di atas 14 tahun persentasenya menurun bahkan lebih rendah daripada laki-laki.

2.3.2. Pendidikan dan Ketrampilan

Di samping adanya kuantitas penduduk, kualitas penduduk sangat penting dalam mempengaruhi kondisi lingkungan setempat. Hal ini dianggap penting karena diasumsikan bahwa penduduk yang makin berkualitas makin menyadari akan pentingnya kondisi lingkungan dalam kehidupan. Untuk melihat kualitas penduduk dalam penelitian ini dikemukakan mengenai tingkat pendidikan dan ketrampilan, kondisi kesehatan, dan pekerjaan.

Kualitas penduduk antara lain dapat dilihat dari struktur penduduk menurut pendidikan. Dalam survei yang dilakukan, tingkat pendidikan penduduk adalah mereka yang telah berumur 6 tahun ke atas atas dasar pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Tabel 2.3.
Komposisi Penduduk Desa Tuapejat Umur 6 Tahun Ke Atas
Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
dan Jenis Kelamin, Tahun 2005 dan 2007

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2005			2007		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Belum/tidak sekolah	2,1	3,5	2,7	3,8	5,4	4,6
Belum/tidak tamat SD	18,6	27,7	22,8	23,8	29,8	26,7
SD tamat	31,2	33,7	32,3	25,2	28,3	26,7
SLTP tamat	25,7	21,8	23,9	22,9	21,0	21,9
SLTA tamat ke atas	22,4	13,4	18,2	24,3	15,6	20,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	237	202	439	210	205	415

Sumber : Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2005-2007

Atas dasar hasil penelitian ini nampak bahwa tingkat pendidikan penduduk di Dusun Tuapejat cukup bagus, hampir separuh tepatnya 42,1 % telah menamatkan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) ke atas. Mereka yang pernah menamatkan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) ke atas hampir seperlimanya (18,2%). Hal ini telah menggambarkan luaran kegiatan pendidikan di daerah tersebut, di samping karena faktor migran masuk yang umumnya juga selektif dilihat dari tingkat pendidikannya. Dari data yang sama juga memperlihatkan bahwa pendidikan penduduk laki-laki lebih baik daripada tingkat pendidikan penduduk perempuan dimana yang telah menamatkan SLTP ke atas masing-masing sebesar 48,1% dan 35,2%. Tingkat pendidikan penduduk perempuan yang lebih rendah tersebut tidak hanya terjadi di desa Tuapejat, tetapi juga di daerah lain di Indonesia. Hal ini terjadi antara lain karena perempuan cepat kawin sehingga kegiatannya mengurus rumahtangga, bahkan ada yang hanya menjadi penganggur. Tabel No.3.3 menunjukkan bahwa perempuan pada saat umur 6-14 tahun yang bersekolah lebih tinggi daripada laki-laki, namun sesudah itu persentase perempuan yang sekolah makin turun sehingga persentasenya di bawah laki-laki.

Adapun informasi tentang ketrampilan yang dimiliki oleh penduduk di Dusun Tuapejat cukup bervariasi. Penduduk etnis Mentawai yang mendominasi daerah tersebut pada dasarnya mempunyai ketrampilan dalam berkebun tanaman keras. Ketrampilan

yang mereka miliki telah diwariskan dari orang tuanya, karena terlibat langsung dalam pengelolaan. Sebagai contoh dalam mengelola pasca panen kelapa adalah proses pembuatan kopra. Setelah panen buah kelapa sudah tua, kemudian daging buahnya dicongkel yang selanjutnya dijemur di bawah terik matahari sampai kering. Kopra yang dihasilkan tersebut kemudian dijual kepada tengkulak yaitu Rp.2000 tiap kg. Sebagian lagi hasil panen kelapa dibuat minyak kelapa yaitu setelah santan hasil perutan kemudian direbus dengan kayu bakar sampai keluar minyaknya. Dalam dasawarsa terakhir ini pembuatan minyak kelapa cenderung menurun karena penduduk mulai mengkonsumsi minyak kelapa sawit yang relatif lebih murah dan mudah diperoleh di warung.

Ketrampilan dalam mengolah hasil tangkapan ikan yang kurang laku untuk dijual sebagai ikan segar, masih terbatas hanya untuk pembuatan ikan asin. Teknologi yang dikuasai masih sederhana yaitu ikan dibelah kemudian dicuci untuk selanjutnya digarami. Setelah itu ikan-ikan tersebut dijemur di bawah terik matahari yang dialasi seng. Dengan teknologi tersebut bila hujan datang maka tumpukan ikan harus dipindahkan, di samping menjadi sasaran lalat. Dalam tempo dua-tiga hari beberapa ibu-ibu keluarga nelayan dapat menghasilkan ikan asin. Karena ikan asin tersebut dari jenis ikan karang yang segar maka rasanya cukup enak sehingga laku dipasarkan, dengan harga sekitar Rp20 ribu rupiah tiap satu kilogram. Jenis ikan yang dimanfaatkan untuk ikan asin antara lain Tambak, Ramung, Tete, dan Todak. Adapun khusus ikan asin dari ikan Kerapu dijual lebih mahal yaitu Rp 25 ribu tiap satu kilogram.

Beberapa keluarga nelayan juga mempunyai ketrampilan membuat bom maupun ketrampilan bagaimana cara melakukan pemotasan yang memerlukan peralatan kompresor. Kendati mereka punya ketrampilan merakit bom ikan namun praktik pengeboman telah berhenti pada tahun 2000 yaitu setelah ada tindakan tegas oleh aparat keamanan. Adapun praktik pemotasan masih berlangsung hingga saat ini. Uraian lebih lanjut tentang hal ini akan diterangkan pada bab enam.

Beberapa orang juga mempunyai ketrampilan membuat batako, kosen rumah, membuat perabot rumahtangga dan ada yang membuat sampan dari kayu untuk ukuran 1 kali 6 meter. Untuk pembuatan sampan umumnya menggunakan kayu jenis Panese. Pembuatan sampan tersebut sifatnya insidental karena tidak selalu ada permintaan pembuatan sampan, karena jumlah nelayan juga masih terbatas. Material untuk pembuatan kusen, perabot dan sampan hampir seluruhnya datang dari kota Padang. Adapun untuk perbaikan motor tempel, di desa tersebut ada mekanik yang mampu memperbaiki, walaupun onderdil mesin harus dibeli di kota Padang.

2.3.3. Pekerjaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 34,4 persen penduduk Dusun Tuapejat yang mempunyai kegiatan utama masuk kategori bekerja.³ Mereka yang bekerja tersebut dengan sendirinya secara ekonomis menanggung beban untuk seluruh anggota rumahtangga, termasuk sebagian besar mereka yang tidak bekerja karena sekolah, mengurus rumahtangga, penganggur, dan anggota rumahtangga yang cacat, serta yang sudah tua-rentan. Di Dusun Tuapejat jumlah penganggur baik yang tidak mencari maupun yang mencari kerja sebesar 11,2 persen, umumnya adalah laki-laki. Kelompok penganggur ini merupakan segmen masyarakat yang perlu memperoleh perhatian untuk diatasi guna mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang dapat terjadi.

Penduduk yang berstatus bekerja tersebut ternyata tidak sampai separuh, tepatnya hanya 47,7 persen, yang bekerja pada sektor pertanian. Ini berarti bahwa sebagian besar mereka bekerja di luar lapangan pekerjaan pertanian, terutama sebagai tenaga jasa (23,8 persen), perdagangan (12,6 persen) dan lapangan pekerjaan lainnya seperti pengojek dan kuli pelabuhan. Dari mereka yang punya pekerjaan utama di pertanian, separuhnya bekerja di perikanan laut yaitu sebagai nelayan, termasuk pengolah hasil ikan menjadi ikan

³ Bekerja adalah kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang dilakukan minimum satu jam dalam seminggu

asin. Pekerjaan sebagai nelayan maupun tenaga kasar umumnya dilakukan oleh laki-laki, adapun kelompok perempuan cenderung berada di sektor jasa dan perdagangan.

Tabel 2.4.
Penduduk Dusun Tuapejat yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2005 dan 2007

Lapangan Pekerjaan Utama	2005			2007		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Perikanan laut	28,7	3,4	23,8	29,6	0,0	24,6
Pertanian pangan	13,1	3,4	11,3	10,2	9,1	10,0
Pertanian tanaman keras	11,5	17,2	12,6	15,7	18,2	16,2
Perdagangan	9,0	27,6	12,6	5,6	22,7	8,5
Jasa	18,0	48,4	23,8	25,9	50,0	30,0
Industri	2,4	0,0	2,0	1,9	0,0	1,5
Lainnya	17,3	0,0	13,9	11,1	0,0	9,2
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	122	29	151	108	22	130

Sumber : Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2005 dan Survei 2007

Pekerjaan sebagai nelayan umumnya masih terbatas sebagai usaha keluarga. Kalau mereka melaut umumnya berdua di mana pasangan kerja dapat anggota keluarga maupun dengan tetangga yang sudah terbiasa. Pekerjaan melaut umumnya dilakukan siang hari, berangkat pagi dan pulang petang hari. Bila pergi melaut dengan tetangga maka hasilnya dibagi rata. Dalam sekali melaut umumnya hasil tangkapan ikan rata-rata 17 kilogram. Pekerjaan melaut hanya dilakukan oleh orang laki-laki yang sudah dewasa, karena sangat beresiko. Adapun hasil tangkapan ikan sebagian diolah oleh istri nelayan. Pengolahan ikan asin telah dirintis oleh beberapa ibu keluarga nelayan di lokasi Jati. Di masa mendatang diperkirakan persentase penduduk yang terserap dalam lapangan pekerjaan di luar pertanian akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Pada saat penelitian mereka yang

bekerja pada kegiatan jasa sudah cukup tinggi, yaitu kurang lebih sama dengan yang bekerja nelayan.

Tabel 2.5.
Penduduk Dusun Tuapejat yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan
Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2005 dan 2007

Jenis Pekerjaan Utama	2005			2007		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Nelayan	29,5	3,4	24,5	31,5	0,0	26,2
Petani	23,8	20,8	23,2	25,9	27,3	26,2
Pedagang	9,0	27,6	12,6	6,5	13,6	7,7
Tenaga jasa	24,6	44,8	28,5	30,6	50,0	33,8
Tenaga industri	2,4	0,0	2,0	1,9	4,5	2,3
Tenaga Kasar	10,7	3,4	9,3	3,7	4,5	3,9
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	122	29	151	108	22	130

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2005 dan Survei 2007

Kegiatan perdagangan pun juga nampak berkembang di desa Tuapejat. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan oleh migran asal Sumatera Barat. Penduduk asli setempat cenderung masih mempertahankan sebagai petani tanaman keras dan tanaman pangan. Usaha perkebunan yang umumnya mereka lakukan adalah tanaman kelapa dan tanaman cengkih. Pemanfaatan hasil panen kelapa hanya sekedar untuk dijual secara glondongan maupun diolah menjadi kopra. Mengingat produksi kelapa cukup potensial sebenarnya bila masyarakat mempunyai ketrampilan yang lebih luas, hasil panen kelapa dapat dimanfaatkan untuk berbagai barang komoditi. Tanaman cengkih hanya menghasilkan setahun sekali. Adapun untuk tanaman kelapa mereka bisa memanen 4 kali setahun. Mereka dapat berusaha tanaman keras karena pemilikan tanah yang relatif luas yang diturunkan oleh orang tuanya baik di daratan P.Sipora maupun di pulau-pulau. Hasil panen cengkih umumnya berupa bunga cengkih cukup hanya dikeringkan, kemudian dijual

kepada pedagang. Pengeringan kopra maupun bunga cengkih cukup dijemur di terik sinar matahari. Kegiatan pengolahan pasca panen tersebut umumnya dilakukan oleh pekerja keluarga tanpa upah.

Tabel 2.6.
Penduduk Dusun Tuapejat yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin,
Tahun 2005 dan 2007

Status Pekerjaan Utama	2005			2007		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Berusaha sendiri	56,6	31,0	51,6	46,3	18,2	41,5
Berusaha dengan buruh	1,6	27,6	24,5	1,9	0,0	1,5
Buruh	18,0	34,5	21,3	27,8	54,5	32,3
Pekerja keluarga tanpa upah	23,8	6,9	2,6	24,1	27,3	24,6
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	122	29	151	108	22	130

Sumber : Data Primer Survai Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2005 dan 2007

2.3.4. Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan mempunyai dimensi yang luas, namun dalam kaitan dengan penelitian ini kesejahteraan lebih ditekankan pada aspek ekonomi yang dilihat dari indikator pemilikan aset rumahtangga baik yang sifatnya produksi maupun yang nonproduksi.

2.3.4.1. *Pemilikan dan Penguasaan Aset Produksi dan Non Produksi*

Dalam konteks penelitian ini ada asumsi bahwa makin banyak memiliki aset maka kesejahteraan rumahtangga secara ekonomis makin lebih tinggi pula. Dalam penelitian yang dilakukan di daerah pantai Dusun Tuapejat telah digunakan 15 jenis pemilikan aset. Kalau pada tahun 2005 hampir empat perlima tepatnya 78,8 persen rumahtangga di dusun tersebut telah memiliki rumah dan

pekarangan, pada tahun 2007 telah mengalami kenaikan menjadi 94 persen. Dengan kata lain ada 21,2 persen rumahtangga masih mengontrak, menyewa, atau hanya menempati tanah dan pekarangan bukan miliknya kemudian telah memiliki rumah, sehingga yang tinggal 6 persen yang statusnya menyewa, mengontrak atau menumpang. Rumahtangga yang belum memiliki rumah dan pekarangan tersebut umumnya para migran yang mempunyai usaha dagang atau pegawai pemerintah daerah yang sementara masih menyewa atau mengkontrak atau menempati rumah sanak keluarga. Adapun bagi rumahtangga yang memiliki aset rumah dan pekarangan nilainya bervariasi, namun secara umum hanya memiliki satu rumah yang rata-rata harganya pada tahun 2005 adalah 45,8 juta rupiah. Meskipun demikian di desa tersebut ada rumahtangga yang memiliki lebih dari satu rumah dan pekarangan, dan ada rumah dan pekarangan yang nilainya 380 juta rupiah.

Dalam tahun 2005 rumahtangga di Dusun Tuapejat 60 persennya memiliki lahan perkebunan rakyat. Mereka yang memiliki tersebut dapat dipastikan adalah penduduk setempat yaitu mereka masuk kategori etnis Mentawai yang telah mewariskan lahan tersebut kepada generasi berikutnya. Berdasarkan observasi kami lahan perkebunan tersebut sangat luas yang menyebar di perbukitan P. Sipora dan di daerah pulau-pulau kecil. Karena lahan perkebunan tersebut luas maka tidak mengherankan bila nilai rata-rata pemilikan aset juga paling tinggi yaitu 114 juta rupiah. Telah disinggung pada uraian di depan bahwa lahan perkebunan tersebut ditanami kelapa, cengkih dan tanaman keras lainnya. Perkebunan ternyata telah menjadi aset rumahtangga yang paling dominan di Dusun Tuapejat.

Adapun aset di bidang pertanian yang lain seperti alat produksi perikanan tangkap masih di bawah nilai aset perkebunan. Rata-rata pemilikan aset perahu motor hanya satu dengan nilai 8,5 juta rupiah dan kekuatannya umumnya hanya 4 PK, walaupun ada yang punya perahu motor dengan kekuatan 25 PK. Perahu motor yang hanya dimiliki seperempat rumahtangga di desa Tuapejat umumnya menggunakan bahan bakar minyak jenis premium. Jumlah rumah tangga sampel yang memiliki perahu motor baik *inboard* atau *outboard* selama tahun 2005-2007 jumlahnya tidak mengalami

perubahan yaitu 28. Jumlah perahu motor telah naik dari 30 perahu pada tahun 2005 menjadi 31 perahu motor pada tahun 2007. Pada waktu penelitian ini berlangsung harga minyak premium mencapai 4000 rupiah pada tahun 2005 dan menjadi 5500 rupiah pada tahun 2007. Di P. Sipora dan khususnya di Dusun Tuapejat belum ada SPBU, sehingga masyarakat hanya mengandalkan pedagang minyak milik perorangan. Rumahtangga nelayan juga memiliki asset perahu tanpa motor yang rata-rata nilai ekonominya pada tahun 2005 hanya 594 ribu rupiah. Jumlah rumah tangga sampel yang memiliki perahu tanpa motor ternyata mengalami kenaikan sebanyak 3 rumah tangga meskipun jumlah perahunya tidak mengalami perubahan yaitu 40 perahu. Perahu tanpa motor yang ada seluruhnya dibuat di desa Tuapejat. Sebagian perahu tanpa motor yang ada kondisinya sebagian sudah rusak. Melihat keadaan pemilikan aset perahu baik motor apalagi yang tanpa motor dapat dipastikan bahwa kemampuan operasi mereka di laut hanya terbatas di sekitar pulau-pulau sehingga setiap hari dapat pulang ke rumahnya.

Alat tangkap yang dimiliki keluarga nelayan juga masih terbatas terutama adalah pancing dan jala. Pancing dan jala adalah paket nelayan tradisional dimana jala adalah untuk menangkap ikan umpan yang umumnya kecil dan bergerombol. Kemudian ikan hasil tangkapan tersebut dijadikan umpan pada waktu memancing ikan. Alat tangkap jaring yang umumnya dibeli dari kota Padang rata-rata nilai asetnya adalah 380 ribu rupiah. Adapun untuk pancing, termasuk tali pancing, yang dimiliki semua nelayan rata-rata nilai asetnya pada tahun 2005 hanya 117 ribu rupiah. Menarik untuk diperhatikan bahwa rumah tangga dan jumlah pemilikan asset pancing telah mengalami penurunan tajam namun rumah tangga dan pemilikan jaring telah mengalami kenaikan antara tahun 2005 dengan tahun 2007. Kalau dilihat dari harga jaring jauh lebih tinggi daripada harga pancing, hal ini telah menunjukkan adanya kemajuan dalam pemilikan asset alat tangkap ikan.

Nelayan di Dusun Tuapejat tidak ada yang mempunyai alat tangkap jala jenis trawl. Bahkan keramba ikan pun tidak dimiliki oleh mereka. Pada tahun 2005 ada satu keramba ikan yang pemilikannya bukan nelayan dusun Tuapejat tetapi milik pengusaha

eksportir ikan hidup yang bermukim di kota Padang. Pada tahun 2007, keramba tersebut sudah tidak ada lagi. Demikian pula daerah tersebut sering didatangi bagan perahu yang datang dari kota Padang. Bagan tersebut telah menggunakan teknologi relatif maju, antara lain penggunaan lampu penerangan puluhan ribu watt sehingga dapat mengundang ikan. Bagan tersebut sangat dinamis sehingga daerah tangkapan dapat pindah-pindah. Hal ini berbeda dengan bagan tancap yang lokasinya menetap. Di daerah Tuapejat tidak dijumpai rumah tangga nelayan yang menggunakan bagan tancap.

Aset tambak juga tidak ada di desa Tuapejat. Ini berarti bahwa di daerah tersebut belum ada budidaya ikan dan udang. Kalau di daerah lain seperti Lampung, Sumatera Timur dan Riau, tambak ikan dan udang banyak memanfaatkan hutan bakau, ternyata di Dusun Tuapejat hal ini tidak dijumpai. Karena itu kondisi lingkungan hutan mangrove di daerah tersebut masih bagus. Di Tuapejat salah satu kegiatan COREMAP antara lain membuat keramba ikan kerapu dan kepiting bakau, namun kegiatan tersebut yang melibatkan kelompok binaan ternyata gagal akibat kesalahan dalam manajemen.

Aset pertanian pangan, termasuk lahan, juga terbatas di mana pada tahun 2005 hanya dimiliki oleh 16 keluarga dengan rata-rata nilai hanya 33,4 juta rupiah. Pada tahun 2007 jumlah rumahtangga sampel yang memiliki aset lahan pertanian mengalami kenaikan yaitu menjadi 27 dengan luas 32,7 hektar. Dalam kurun waktu 2005-2007 telah terjadi penambahan luas lahan pertanian 11,7 hektar. Daerah tersebut memang bukan sumber utama penghasil tanaman pangan. Tanaman pangan yang ada antara lain padi dan umbi-umbian. Oleh karena itu kebutuhan pangan sangat tergantung dari daratan P.Sumatera. Adapun aset rumahtangga sampel tahun 2005 dari peternakan, terutama babi, ayam bukan ras dan domba, rata-rata nilainya mencapai 1,073 juta rupiah. Aset dari peternakan babi cukup bermakna karena sebagian besar penduduk masih mengkonsumsi daging babi pada waktu ada pesta kelompok orang Mentawai yang beragama kristen.

Tabel 2.7.
Distribusi Memiliki Aset Menurut Jumlah Rumah Tangga
dan Jumlah Aset di Dusun Tuapejat
Tahun 2005 dan Tahun 2007

Pemilikan aset	Tahun 2005		Tahun 2007	
	Jumlah Rumah tangga	Jumlah	Jumlah Rumah tangga	Jumlah
Perahu bermotor	28	30 perahu	28	31 perahu
Perahu tanpa motor	32	40 perahu	35	40 perahu
Jaring	13	25 unit	33	33 unit
Bagan	7	7 unit	0	0
Bubu	0	0	0	0
Pancing	40	233 unit	9	20 unit
Keramba	0	0	0	0
Trawl	0	0	0	0
Tambak	0	0	0	0
Lahan pertanian	16	21 hektar	27	32,7 hektar
Lahan perkebunan	52	91 hektar	t.a	t.a
Rumah	82	88 unit	94	95
Televisi	54	54 unit	64	66
Kendaraan bermotor	18	25 kendaraan	34	40 kendaraan
Perhiasan emas	17	141 gram	23	190 gram
Jumlah RT	104	-	100	-

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2005 dan 2007

Dusun Tuapejat kendati letaknya di kepulauan namun karena perkembangan teknologi informasi telah menjangkau daerah tersebut sehingga pada tahun 2005 ada 54 rumahtangga telah memiliki aset elektronik televisi. Pada tahun 2007 rumah tangga sampel yang memiliki TV telah naik menjadi 64. Selain itu mereka juga banyak yang menggunakan parabola, radio, handphone, tape, dan lain-lain. Pada tahun 2005 rata-rata nilai aset pemilikan elektronik mencapai 3,055 juta rupiah. Dengan adanya siaran televisi dan radio maka penduduk daerah tersebut dapat mengikuti perkembangan situasi nasional bahkan internasional. Keberadaan televisi telah menjadi media hiburan keluarga yang paling utama, karena tempat hiburan lain hampir tidak ada. Kalau ingin memperoleh alternatif tempat hiburan harus pergi ke kota Padang.

Pemilikan aset rumahtangga yang lain adalah pemilikan perhiasan dan pemilikan kenderaan bermotor. Pemilikan perhiasan emas umumnya dimiliki oleh kaum perempuan selain sebagai simbol kewanitaan juga sebagai cara untuk menabung kelebihan rezeki. Untuk mendapatkan perhiasan emas ibu-ibu umumnya membeli di kota Padang karena di Dusun Tuapejat belum ada toko emas. Dari tahun 2005 dari 17% rumahtangga yang mengaku memiliki perhiasan, rata-rata hanya bernilai 2,4 juta rupiah. Pada tahun 2007 rumah tangga yang memiliki aset perhiasan emas telah naik menjadi 23 dengan jumlah 190 gram emas. Pemilikan tersebut tentunya di bawah perkiraan, karena tidak semua responden bersedia menjawab dengan jujur tentang pemilikan aset perhiasan emas.

Adapun rumahtangga sampel yang menyatakan memiliki kenderaan bermotor juga mengalami kenaikan dari 18 menjadi 34. Jumlah aset kenderaan juga mengalami kenaikan dari 25 menjadi 40 kenderaan. Penambahan tersebut tentunya sejalan dengan makin diperlukannya kenderaan bermotor untuk meningkatkan mobilitas mereka.

Atas dasar uraian tentang jumlah rumah tangga sampel dan jumlah pemilikan aset secara umum telah menunjukkan kemajuan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan rumahtangga di Dusun Tuapejat telah mengalami perbaikan pada kurun waktu 2005-2007.

2.3.4.2. *Kondisi Perumahan dan Sanitasi Lingkungan*

Telah disinggung pada uraian tentang kondisi kesehatan di Dusun Tuapejat, bahwa perumahan yang ada saat ini sudah mulai padat, terutama di lokasi dataran rendah daerah pesisir. Umumnya rumah penduduk adalah berdinding tembok yang jumlahnya cenderung makin bertambah. Ada kesan bahwa rumah tembok lebih baik daripada rumah kayu, padahal daerah tersebut mempunyai resiko tinggi bila terjadi gempa bumi. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah tersebut masih miskin terhadap pengetahuan tentang isu gempa. Rumah tembok akan lebih mudah hancur bila terkena

gonjangan gempa daripada rumah kayu. Rumah-rumah permanen yang terbuat dari tembok batako, hampir seluruhnya menggunakan fondasi yang materialnya adalah hasil penambangan karang mati yang diambil dari laut. Meskipun demikian beberapa rumahtangga masih mempertahankan kondisi perumahan yang terbuat dari kayu yang mempuyai kolong. Pada saat ini membuat rumah kayu sudah mahal, karena kayu yang ada sudah didatangkan dari luar pulau. Harga kayu jenis “katuka” sudah mencapai lebih dari Rp.800.000 tiap M3, adapun jenis “meranti” juga di atas Rp 900 tiap M3.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari sebagian besar rumahtangga masih menggantungkan pada air sumur (87,9 persen), meskipun masih ada pula yang menggunakan air hujan sebagai sumber air bersih (10,1 persen). Rumahtangga yang menggunakan air hujan sebagai sumber air bersih umumnya adalah mereka yang tinggal di bukit. Adapun rumahtangga yang menggunakan pompa air tanah hanya sebagian kecil (2 persen), yaitu mereka yang dianggap mampu secara ekonomi. Meskipun sebagian besar rumahtangga menggunakan air sumur, berdasarkan pengamatan, kualitas air cukup bagus yaitu bening, tawar dan tidak bau. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah tersebut belum terjadi intrusi air laut ke daratan, selain daya dukung sumberdaya air tawar masih bagus. Meskipun demikian ada pula rumahtangga yang kurang memperhatikan keberadaan sumur-sumur mereka yang mudah kena banjir dan dekat dengan sumber pencemar, seperti tempat pembuangan limbah kotoran rumahtangga. Ada 34 persen rumahtangga yang membuang sampah di lubang sampah dan 25 persen ditumpuk di halaman. Sumur-sumur di Dusun Tuapejat umumnya adalah sangat dangkal, kecuali permukiman di perbukitan, sehingga mudah terkontaminasi oleh polutan rumahtangga.

Rumahtangga penduduk Dusun Tuapejat meskipun telah menggunakan jamban dengan *septic tank* (43,4 persen), namun rembesan tinja besar kemungkinan masih berpotensi sebagai sumber pencemar, apalagi mereka yang menggunakan WC cemplung (33,3 persen). Rumahtangga yang lain telah memanfaatkan pantai laut dan kolam sebagai tempat buang air besar. Mereka yang memanfaatkan

pantai sebagai tempat buang air besar, terutama adalah rumahtangga yang tempat tinggalnya berada di pinggir pantai.

Pantai juga menjadi tempat pembuangan sampah rumahtangga (34 persen). Dalam sampah yang dibuang tersebut sebagian adalah sampah unorganik seperti plastik dan sabun diterjen. Sampah yang dibuang ke laut sampai saat ini belum menimbulkan masalah serius, karena jumlahnya masih terbatas dan kotoran mudah hilang terbawa arus laut. Namun dimasa depan hal ini akan menjadi masalah serius karena perkembangan permukiman yang cenderung makin bertambah pesat.

Penduduk Dusun Tuapejat dalam kehidupan sehari-hari umumnya mengkonsumsi ikan segar hasil tangkapan para nelayan yang biasanya pulang hari. Karena mereka pulang hari, maka kondisi ikan umumnya masih segar. Penduduk dalam kesehariannya tidak mengkonsumsi daging sapi maupun daging domba. Daging yang mereka konsumsi adalah daging ayam baik yang buras (ayam kampung) maupun ayam ras yang didatangkan dari kota Padang. Adapun sebagian keluarga yang bermukim dekat hutan mangrove, ada yang mengkonsumsi moluska yang oleh mereka disebut lilit. Dengan adanya ketersediaan pangan hewani tersebut telah meningkatkan status gizi masyarakat.

Kondisi kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh sanitasi lingkungan. Desa Tuapejat yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di dataran rendah yang sempit, kondisi lingkungannya terasa padat dan tidak teratur. Permukiman penduduk tumbuh secara alami, tanpa ada pengaturan tata-ruang sehingga banyak jalan sempit diantara rumah-rumah penduduk dan tanah becek bekas rawa. Kondisi permukiman yang padat dan tanah becek tersebut tentunya kurang kondusif untuk kesehatan. Bila terjadi hujan sebagian jalan lingkungan dan halaman rumah tergenang air. Oleh karena itu malaria masih menjadi penyakit endemik di daerah tersebut. Penyakit malaria tersebut berkembang setelah ekosistem hutan di daerah P.Sipora mulai rusak. Untuk mengatasi berjangkitnya malaria antara lain NGO Surf International telah membagikan kelambu secara gratis kepada warga setempat. Penyakit lain yang

sering terjadi adalah infeksi saluran pernafasan atas, terutama sering menyerang anak-anak. Penyakit tersebut telah memperoleh perhatian dari Dinas Kesehatan sehingga jumlah penderita cenderung berkurang. Untuk memperoleh obat malaria maupun obat flu dapat dibeli di warung obat atau berobat di Puskesmas yang jaraknya 5 kilometer dari Dusun Tuapejat.

Hasil diskusi dengan beberapa nelayan yang mengikuti diskusi *focus group* menunjukkan bahwa nelayan yang sering menyelam belum ada yang menderita tuli atau buta. Meskipun demikian diceriterakan bahwa pada tahun 2000, pernah ada kasus seorang anak buah kapal nelayan asal Sibolga yang menderita luka parah akibat kecelakaan pada waktu melakukan pengeboman. Dengan adanya bukti pengeboman tersebut, seluruh awak kapal diusir pergi dan kapalnya ditahan. Kapal tersebut dibiarkan rusak walaupun ada permintaan untuk ganti rugi., namun tetap ditolak. Kendati kejadian ini dianggap salah namun kasus ini ternyata tidak diproses di pengadilan. Pada saat itu nelayan Tuapejat menjadi kompak dalam menangani kasus pengeboman tersebut. Adapun penduduk yang menderita penyakit kulit tidak banyak dijumpai, antara lain karena cukup tersedianya air bersih di daerah tersebut.

BAB III

COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA

Uraian pada bagian ini ingin ditekankan pada: Pertama, seberapa besar tingkat kemampuan teknis manajerial dari jajaran petugas pelaksana kegiatan COREMAP yang tercermin pada kinerja lembaga yang ada, Ke dua, ingin mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan program COREMAP, dan ke tiga, ingin mengetahui tentang seberapa besar tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan COREMAP. Ke tiga hal tersebut merupakan indikator terpenting dalam menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan program COREMAP

3.1. PELAKSANAAN COREMAP : PERMASALAHAN DAN KENDALA

3.1.1. Tingkat Kabupaten

Hampir seluruh program kegiatan COREMAP diputuskan berdasarkan usulan kegiatan yang dibuat pada tingkat desa, yang dalam perumusan proposalnya melibatkan pemerintah desa, unsur Dewan Perwakilan Desa, Fasilitator Desa, LPSTK, LSM, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Di tingkat kabupaten dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, semua usulan yang disampaikan akan dilihat layak dan tidaknya kegiatan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain tingkat kesesuaian dengan kondisi lingkungan dan potensi sumber daya alam yang ada, kemampuan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, menjajagi kemungkinan resiko yang akan dihadapi dan cara penanganannya, segi keuntungan dan kerugiannya bila kegiatan tersebut disetujui, serta dampaknya bagi upaya penyelamatan ekosistem terumbu karang.

Pada tahap selanjutnya, usulan kegiatan harus ditindaklanjuti dengan studi kelayakan (*feasibility study*) dengan melibatkan sejumlah tenaga ahli menyangkut bidang kegiatan yang diusulkan. Hasil dari

studi kelayakan ini, kemudian dibahas dalam suatu pertemuan yang mengundang berbagai instansi terkait, dan masyarakat luas untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan sebuah program dan rencana detil menyangkut teknik operasionalisasinya.

Keterlibatan masyarakat ini penting, dimaksudkan untuk mendidik rasa tanggungjawab dan menumbuhkan komitmen serta rasa memiliki terhadap suatu program kegiatan, sehingga pada akhirnya diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi suatu kegiatan. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengawasan ini lebih didorong atas besarnya kepedulian masyarakat terhadap program kegiatan yang dijalankan. Selain pengawasan masyarakat, pada tahap pelaksanaan kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai harus memonitor setiap langkah perkembangan kegiatan, agar sekecil apapun persoalan yang dihadapi dapat diketahui secara dini, sehingga cepat dicarikan solusinya, dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Memperhatikan dari sejumlah item kegiatan COREMAP di Desa Tuapejat, yang hampir seluruh kegiatan yang dilakukan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, mengindikasikan tidak maksimalnya penanganan setiap tahapan kegiatan yang dilalui. Hal ini terbukti dengan tidak diketemukannya satu pun laporan menyangkut hasil studi kelayakan dan rencana detail operasionalisasi dari suatu program kegiatan. Hal ini sekaligus menunjukkan tidak memadainya kemampuan monev pada aparat perumus program kegiatan di tingkat kabupaten.

Informasi yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan wawancara mendalam kepada sejumlah informan, menyebutkan bahwa hampir seluruh kegiatan yang dilakukan, tidak ditempuh dengan kajian kelayakan yang memadai, sehingga hampir seluruh kegiatan program COREMAP tidak dapat berjalan. Ditingkat kabupaten, kebijakan yang melindungi upaya penyelamatan terumbu karang, sudah keluar dalam bentuk aturan pelarangan kegiatan yang dapat merusak terumbu karang, melalui Surat Keputusan Bupati, tetapi oleh pihak aparat penegak hukum dinilai masih lemah, karena belum memiliki acuan berupa Perda yang memuat secara rinci

menyangkut kategori tindak pelanggaran dan sanksi yang bakal diterima oleh pihak pelanggar. Hal ini mengakibatkan keraguan bertindak sejumlah aparat penegak hukum terkait.

Sungguh pun demikian, keluarnya SK Pelarangan tersebut, sudah membawa dampak pada berkurangnya aktivitas pengambilan terumbu karang dan penambangan pasir. Namun efektivitas sebuah pelarangan akan berumur panjang apabila ditemukan bahan material bangunan pengganti terumbu karang, serta matapencapaian alternatif pengganti aktifitas kenelayanan yang berdampak merusak ekosistem terumbu karang. Inilah tantangan yang harus dihadapi petugas pelaksana kegiatan COREMAP. Sejalan dengan program pengelolaan ekosistem laut dan terumbu karang pada saat ini telah diselesaikan draft peraturan daerah yang penyusunannya melibatkan DPRD dan pihak eksekutif.

3.1.2. Tingkat desa

- Pembentukan, kinerja dan kegiatan LPSTK

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa roda bergeraknya kegiatan COREMAP terletak pada bekerjanya Lembaga Pengelola Sumberdaya terumbu Karang (LPSTK) dan petugas Fasilitator Desa (FD) selaku petugas pendamping kegiatan program COREMAP. Lembaga tersebut berperan sebagai agen perubahan sosial. Perannya yang demikian menuntut sejumlah kemampuan manajerial untuk merencanakan suatu program kegiatan, memiliki pengalaman, pengetahuan, dan skil yang memadai berkaitan dengan setiap program yang dilakukan. Statusnya yang demikian juga menuntut kemampuannya untuk dapat memahami kondisi sosial budaya masyarakat binaannya. Secara administrative LPSTK juga dituntut untuk melakukan tertib administrasi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan, oleh karena lembaga ini akan berfungsi sebagai pusat informasi menyangkut segala hal yang bersangkutan dengan kegiatan program COREMAP. Fungsinya yang demikian juga menuntut perlunya prasarana penunjang kegiatan administrasi serta kemampuan teknis mengoperasikan peralatan kerja tersebut.

Bila gambaran ideal tersebut diperhadapkan dengan kondisi riil keberadaan LPSTK, akan segera tampak beberapa persoalan yang dihadapi. Hal yang sangat diperlukan bagi siapa pun yang ingin mengetahui program kegiatan COREMAP adalah menyangkut ketersediaan sumber informasi yang ada pada LPSTK. Sumber informasi tersebut bisa berbagai macam bentuknya, antara lain catatan harian yang dilakukan jajaran pengurus LPSTK, foto-foto dokumentasi hasil kegiatan, buku-buku hasil laporan kegiatan, peta-peta lokasi kegiatan, jadwal kegiatan, laporan keuangan kegiatan, laporan hasil-rapat pengurus, peralatan kerja, dan sebagainya.

Temuan penelitian menunjukkan tidak satu pun menemukan catatan-catatan tertulis seperti apa pun bentuknya yang memuat tentang kegiatan COREMAP pada lembaga tersebut. Satu-satunya informasi hanya berupa keterangan lisan dari sejumlah pengurus, itu pun tidak lengkap karena keterbatasan daya ingat mereka..Mengapa hal ini tidak dilakukan ? Jawaban dari sejumlah jajaran pengurus LPSTK, karena lembaga tersebut tidak didanai dan diperlengkapi dengan peralatan kerja yang memadai.

Masuk akal jawaban tersebut, sehingga LPSTK tidak mampu menjalankan perannya secara maksimal.Tetapi jawaban tersebut tidak semuanya benar. Kalau toh hanya sekedar membuat catatan-catatan kecil seperti apa pun bentuknya, apakah mereka memang tidak memiliki kemampuan ? Persoalan yang sebenarnya terletak pada rendahnya kesadaran akan arti pentingnya mendokumentasikan dari hasil suatu kegiatan. Lalu apa artinya akan dibangun “Pondok Informasi” kalau kesadaran tersebut belum dimiliki ? Karena itu, tidak ada jaminan LPSTK akan mampu menjalankan perannya kalaupun kebutuhan finansialnya dan segala peralatan kerjanya dipenuhi.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa bantuan finansial dan peralatan kerja tidak perlu. LPSTK akan mampu menjalankan perannya apabila bantuan tersebut didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Mungkin bisa dimengerti jalan pikiran para perumus kegiatan program COREMAP, bahwa pada dasarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali tumbuhnya

swadaya masyarakat, sehingga bantuan finansial dan peralatan kerja tidak dibutuhkan. Tetapi perlu disadari pula bahwa lahirnya swadaya masyarakat tidak akan muncul begitu saja, dibutuhkan waktu yang cukup lama, itu pun kalau program kegiatan COREMAP berhasil, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari kegiatan tersebut. Disinilah terasa adanya suatu kejanggalan dibentuknya sebuah institusi untuk menjalankan suatu kebijakan nasional, tetapi tidak disertai dengan pendanaan yang memadai.

Secara sosiologis, LPSTK juga mengidap kelemahan yang paling dasar, yakni ketidakmampuannya memahami kondisi sosial budaya masyarakat binaannya. Sebagai ilustrasi bisa dicontohkan, bahwa jajaran pengurus LPSTK tidak dapat memahami perilaku Anjelus sebagai warga masyarakat Desa Tuapejat yang menuntut setiap pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya laut harus meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Mereka juga tidak mengerti, mengapa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan penambangan pasir laut dan pengambilan terumbu karang harus meminta izin kepada Anjelus, serta harus membayar uang “bunga karang” dan “bunga pasir”. Sama tidak dimengertinya, mengapa seorang wisman dari Italia yang sudah menikah dengan penduduk setempat, sudah membeli sebidang tanah di P. Makakang yang sudah dibangun resort dan home stay berbatasan langsung dengan tempat diving dan berselancar di sekitar P. Setan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Anjelus apabila ingin melakukan segala aktifitas yang berhubungan dengan wilayah perairan laut sekalipun hanya sekedar memancing ?

Di mata jajaran petugas pelaksana kegiatan COREMAP, selama ini timbul prasangka bahwa aktifitas penambangan pasir laut dan pengambilan terumbu karang dibekingi dan dikoordinir oleh Anjelus. Cara pandang demikian bisa dimengerti. Bagi para pelaksana kegiatan COREMAP dan jajaran pengurus LPSTK, laut adalah milik bersama yang bersifat open access, oleh karena itu siapa pun bebas memasuki dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Bagi masyarakat kesukuan Mentawai khususnya suku Katubo Oinan, laut adalah bagian dari tanah ulayat suku. Klaim wilayah perairan sebagai perpanjangan tanah ulayat meliputi, tanaman mangrove, pantai

Tidak dipahaminya kondisi sosial budaya masyarakat binaan serta salah persepsi mengenai status Anjelus, menjadikan tidak kondusifnya lahan tempat bersemainya kegiatan program COREMAP di bumi Tuapejat. Terbukti bahwa kegiatan konservasi berupa pembuatan Daerah Perlindungan Laut (DPL) tidak berumur panjang. Hanya dalam hitungan hari, kegiatan tersebut sudah lenyap dirusak orang.. Sungguh pun demikian, tulisan ini tidak bermaksud sedikit pun berprasangka buruk terhadap Anjelus selaku tua-tua adat suku Katubo Oinan, apa lagi menuduh sebagai pelaku perusakan DPL. Dalam tulisan ini hanya ingin ditunjukkan betapa tidak tepatnya pendekatan sosial yang dilakukan selama ini.

Sebagian besar pengurus LPSTK berasal dari orang-orang yang semula terlibat dalam kegiatan penambangan pasir laut dan pengambilan terumbu karang. Pendidikan mereka pun hanya tamat SLTP dan sebagian yang lain Tamat SLA. Menilik latar belakang pekerjaan yang mereka lakukan, tingkat pendapatan yang mereka peroleh, bisa dipastikan bahwa status sosial mereka rendah. Pemimpin LPSTK sendiri tipis kadar kepemimpinannya dirasakan oleh masyarakat. Secara fisik aktivitas kesehariannya juga terkendala oleh factor usia yang sudah uzur. Rendahnya status sosial yang melekat pada jajaran pengurus LPSTK, telah mengakibatkan sulitnya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, dan teknologi baru yang ingin diterapkan melalui program COREMAP sulit diterima masyarakat. Sebuah pembaharuan sosial mensyaratkan perlunya gagasan-gagasan baru dan teknologi baru yang ingin diterapkan harus disalurkan melalui sekelompok warga masyarakat yang memiliki status sosial tinggi. Dengan pengaruh yang dimilikinya sebuah perubahan akan mudah diterima masyarakat.

Secara teknis, baik petugas pendamping Fasilitator Desa, Pokmas, jajaran pengurus LPSTK tidak memiliki pengalaman, pengetahuan dan keahlian menyangkut bidang-bidang kegiatan yang ditangani, akibatnya bila suatu kegiatan menghadapi permasalahan, mereka tidak mampu mencarinya solusinya, sehingga kegiatan ditinggalkan begitu saja. Kegagalan demi kegagalan adalah buah dari ketidakmampuan petugas pelaksana kegiatan tersebut.

- *Pembentukan, kinerja dan kegiatan Pokmas*

Uraian pada bagian ini, tidak akan membahas satu persatu kegiatan Pokmas, mengingat demikian banyaknya Pokmas yang dibentuk. Cukup sekedar dapat mengilustrasikan bagaimana suatu Pokmas dibentuk, bagaimana bekerjanya Pokmas, serta kegiatan apa saja yang dilakukan Pokmas, akan diuraikan beberapa contoh kasus pembentukan Pokmas. Salah satunya adalah Pokmas usaha ekonomi produktif, yang terdiri dari 3 kelompok, melibatkan sejumlah 23 orang. Tepatnya adalah “Pokmas Bina Lestari Laut” yang beranggotakan 6 orang, kelompok “Reureubaga”, dari bahasa Mentawai yang artinya bersedih hati, atau sakit hati, beranggotakan 10 orang, yang terdiri dari 6 orang penduduk asli Mentawai dan 4 orang penduduk pendatang dari Sumatera Barat. Ke tiga adalah kelompok “Batu Tongga Jaya”.

Masing-masing anggota Pokmas diberi bantuan dana bergulir sebesar Rp 4.400.000,-. Dana tersebut diperuntukkan membeli mesin Robin, pancing rapala, tali jangkar, dan jala ikan. Bantuan tersebut harus kembali dalam jangka waktu 3 tahun.. Besarnya angsuran perbulan setiap anggota Rp 175.000,-. Jumlah total pengembalian pinjaman sebesar Rp 6.700.000,-. Artinya selama 3 tahun besar bunganya Rp 2.300.000,-. Ke tiga Pokmas ini berada dibawah bimbingan LPSTK.

Terkait dengan pembentukan Pokmas, kronologi pembentukannya diawali dengan kehadiran beberapa petugas DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menginformasikan kepada LPSTK, Kepala Desa, DPD, akan ada bantuan dana bergulir dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat nelayan.. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah desa dan LPSTK diminta untuk membentuk wadah kegiatan berupa Pokmas nelayan. Atas dasar informasi tersebut, pemerintah desa bekerja sama dengan jajaran pengurus LPSTK menindaklanjuti dengan mengumpulkan sejumlah warga yang berdomisili di sekitar kantor desa. Dalam pertemuan yang diadakan di balai desa, jumlah kelompok dan anggota masing-masing kelompok ditentukan dalam pertemuan tersebut, dengan syarat dalam satu kelompok diantara anggota harus saling kenal secara pribadi,

menyangkut watak, karakter dan tabiat moral serta kejujuran masing-masing anggota. Hal ini sangat ditekankan karena cara pengembalian pinjaman akan dilakukan secara tanggung renteng, artinya apabila ada seseorang yang menunggak, maka pengembaliannya akan menjadi tanggungan anggota lainnya. Hal yang menarik dalam pembentukan kelompok ini adalah menyangkut latar belakang pekerjaan si penerima bantuan. Banyak diantara mereka yang sesungguhnya tidak memerlukan barang tersebut, karena matapencarian mereka bukan nelayan, tetapi petani. Motivasi mereka bergabung dalam kelompok hanyalah karena imbalan pinjaman uang, dan keterlibatan mereka lebih didorong oleh karena kesulitan keuangan rumah tangga, seperti untuk membiayai anak sekolah, ongkos berobat, belanja kebutuhan dapur, terlibat hutang, dan sebagainya.

Saat penelitian ini dilakukan, bantuan tersebut sudah berjalan 2 bulan. Belum ada satu pun warga yang mengembalikan pinjaman ke LPSTK, belum juga ada pengawasan dari LPSTK maupun petugas pengawas DKP apakah bantuan dipergunakan sesuai dengan rencana atau tidak. Begitu juga belum tampak ada kegiatan kelompok, misalnya pertemuan-pertemuan rutin yang membahas kegiatan anggota, kesulitan masing-masing anggota dalam mengoperasikan alat tangkap ikan yang baru, dan bagaimana pendokumentasian serta pembukuan kegiatan kelompok dilakukan. Hal ini mencerminkan buruknya kinerja Pokmas. Buruknya kinerja Pokmas juga dialami oleh Pokmas-Pokmas sebelumnya, seperti Pokmas Usaha Ekonomi Produksi, Pokmas Wanita, Pokmas Konservasi dan sebagainya. Keterlibatan mereka di dalam Pokmas bukan karena motivasi mereka untuk menekuni dan mensukseskan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, tetapi lebih pada perolehan insentif keuntungan sesaat dengan mengikuti kegiatan. Akibatnya eksistensi pokmas tidak berumur panjang. Bersamaan dengan selesainya kegiatan dan berakhirnya pemberian bantuan, lenyap pula eksistensi Pokmas.

Sehubungan dengan telah tersalurkannya bantuan tersebut, yang banyak muncul justru keluhan anggota Pokmas bahwa pinjaman tersebut dirasa cukup memberatkan, karena bunganya yang dinilai cukup tinggi, lebih dari 50% selama 3 tahun. Resiko tidak dapat

mengangsur pada masa paceklik ikan (musim angin barat) apabila ada sebagian besar anggota yang tidak dapat mengangsur, apakah juga akan dibebankan kepada anggota lain yang ingin mengangsur pinjaman ? Hal ini masih menjadi persoalan yang belum mendapat penyelesaian jalan keluarnya.

Berkaitan dengan soal pemberian nama kelompok, ada satu Pokmas yang menamakan dirinya “Reureubaga” yang artinya “sedih hati” atau “sakit hati”. Pemilihan nama ini tentunya mengandung makna dibalik nama. Mengapa kata-kata ini dipilih ? Apa maksud yang dikandung dibalik nama tersebut ? Hampir setiap informan yang diwawancarai hanya menyebut “sedih hati”. Tetapi sedih hati karena apa, dan sakit hati kepada siapa ? hingga penelitian ini berakhir belum mendapatkan jawabnya.

- *Kegiatan sosialisasi dan pelatihan*

Sosialisasi dan pelatihan dalam suatu program kegiatan adalah suatu proses pembelajaran untuk menguasai teknologi suatu bidang kegiatan, sekaligus menanamkan pengertian pentingnya suatu kegiatan bagi masyarakat. Sosialisai juga berarti serangkaian suatu kegiatan yang sarad dengan aksi penyadaran bahwa masyarakat sesungguhnya sedang menghadapi persoalan besar yang masyarakat sendiri tidak menyadarinya.

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tindakan seperti penyuluhan masyarakat. Wadah penyalurannya bisa melalui berbagai media, seperti lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat, antara lain lembaga pengajian wiritan yang diselenggarakan tiap hari Jumat oleh ibu-ibu, kegiatan “Morebo” kebaktian ibu-ibu, kegiatan ibu-ibu PKK, dan pertemuan desa. Sangat disayangkan keberadaan institusi sosial yang ada belum dimanfaatkan sebagai saluran sosialisasi kegiatan program COREMAP.

Sosialisasi kegiatan yang selama ini dilakukan antara lain, pembuatan papan-papan pengumuman kegiatan, peta-peta kegiatan, yang dipasang di pusat-pusat keramaian seperti dermaga pelabuhan dan lapangan pelabuhan. Memperhatikan kondisi papan-papan

tersebut, tampaknya kurang terawat. Sosialisasi juga dilakukan melalui pendidikan di sekolah-sekolah dasar yang ada, penyebaran poster, pamflet, leaflet ke berbagai tempat seperti pasar, toko-toko, warung, dan beberapa kantor pemerintah. Tetapi satu hal yang penting yang belum dilakukan adalah pemberian buku-buku pelajaran lingkungan hidup yang memuat pentingnya arti terumbu karang bagi kehidupan. Buku-buku tersebut sudah ada, dibiarkan menumpuk di kantor DKP, tidak jelas alasannya kenapa tidak segera diedarkan.

Dalam kaitannya dengan kegiatan pelatihan, informasi yang diperoleh dari sejumlah informan menyebutkan bahwa pelatihan hanya diberikan oleh petugas kepada Pokmas menjelang akan dilakukannya kegiatan. Setelah kegiatan dilakukan, tidak ada evaluasi lebih lanjut apakah masing-masing anggota Pokmas sudah menguasai keterampilan bidang kegiatan yang dilakukan, kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi Pokmas, bagaimana solusinya, tidak pernah dilakukan monitoring menyangkut hal tersebut. Sebagai contoh, ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan warung usaha, tidak dibekali dengan keterampilan pembukuan usaha, sehingga mereka tidak tahu, apakah usahanya untung atau merugi. Kegiatan pelatihan yang lain seperti pelatihan konservasi dan kerajinan industri rumah tangga banyak dilakukan di luar desa, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan pelatihan tersebut.

Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa dari sejumlah 100 responden yang diwawancarai, hanya sejumlah 29 responden yang menjawab mengetahui adanya kegiatan pelatihan, 21 responden menyatakan tidak tahu, dan sejumlah 50 responden yang lain tidak menjawab. Jawaban tersebut mencerminkan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan pelatihan yang dilakukan melalui kegiatan program COREMAP.

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan pelatihan memiliki korelasi terhadap rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelatihan. Hal ini tercermin pada jawaban responden. Sejumlah 12 responden menjawab terlibat dalam kegiatan pelatihan, 17 responden menjawab tidak terlibat, dan 71 responden tidak menjawab. Hasil survei tersebut di atas cukup jelas

mengindikasikan tidak maksimalnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

- *Kegiatan Pengawasan*

Monitoring dan pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan program pengembangan masyarakat. Dengan kegiatan pengawasan agar sekecil apa pun permasalahan dapat diketahui secara dini, sehingga dengan cepat dapat dicarikan solusinya.

Dalam kenyataannya, kegiatan pengawasan belum dilakukan secara maksimal. Sebagai ilustrasi bisa diambil contoh kasus pada pemberian bantuan dana bergulir berupa pembelian sarana tangkap kepada 3 kelompok nelayan yang baru saja dibentuk. (lihat uraian sebelumnya). Juga kegiatan pelatihan kerajinan industri rumah tangga souvenir dari kulit kerang, yang dilakukan dengan mengirim calon pengrajin ke daerah Situbondo Jawa Timur. Sekembali dari mengikuti kegiatan pelatihan seorang pemuda peserta pelatihan tersebut terlihat tidak melakukan aktivitas apa pun, dia masih tetap menganggur. Tidak satu pun pengurus LPSTK, petugas DKP dan Fasilitator Desa menanyakan perkembangan kegiatan pelatihan yang baru saja diikutinya. Tidak juga ditanya apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan setelah 3 bulan mengikuti pelatihan. Diketahui sejumlah kendala untuk mengembangkan usaha kerajinan souvenir oleh pihak LPSTK, Fasilitator Desa, antara lain ketiadaan zat pencerah ukiran (rezin) di desa setempat. Tetapi tidak juga mendorong pihak jajaran pelaksana kegiatan COREMAP segera mencarikan solusinya. Dibiarkannya pemuda tersebut menganggur, “klontang-klantung” ke sana ke mari tidak jelas apa yang harus diperbuat. Hal ini menunjukkan minimnya kegiatan pengawasan dan pendampingan kegiatan COREMAP. Informasi yang diperoleh dari masyarakat, menyebutkan hampir semua kegiatan yang telah dilakukan, ditinggalkan begitu saja, tanpa diikuti dengan kegiatan pendampingan dan pengawasan yang berarti.

- *Kegiatan usaha ekonomi produktif*

Beberapa kegiatan usaha ekonomi produktif yang telah dilakukan antara lain; membuat minyak kelapa, memasak kue, membuka warung usaha, membuat abon ikan, membuat bakso ikan, membuat pengeringan ikan asin, dan ternak itik/bebek. Saat penelitian ini dilakukan, tidak satu pun kegiatan tersebut yang masih berjalan, bahkan sejumlah bantuan peralatan masak yang diberikan telah raib tidak tahu entah dimana keberadaannya.

Kegiatan pengelolaan produksi pasca panen seperti pengolahan hasil laut, terkendala oleh beberapa hal, antara lain; pertama, hasil tangkapan ikan memang tidak banyak dan habis dikonsumsi dalam bentuk ikan segar. Ke dua, kegiatan pengolahan hasil laut terkendala oleh tidak adanya peluang pasar setempat, karena cita rasa produk tersebut memang tidak diminati masyarakat. Masyarakat setempat lebih suka mengonsumsi ikan segar. Akibatnya produk tersebut tidak laku dijual. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan manajerial para petugas yang terlibat dalam perumusan program kegiatan COREMAP.

3.2. PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN/PROGRAM COREMAP

Dalam upaya penyelamatan terumbu karang melalui kegiatan COREMAP, telah dilakukan berbagai kegiatan. Sehubungan dengan telah dilakukannya kegiatan tersebut, maka pertanyaan yang paling mendesak untuk diajukan kepada kelompok sasaran kegiatan adalah, seberapa jauh masyarakat mengetahui maksud dan tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan. Asumsi yang mendasari perlunya pertanyaan tersebut diajukan adalah, semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat, akan menentukan tingkat keberhasilan suatu program kegiatan yang dilakukan. Sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan kelompok sasaran terhadap kegiatan yang dilakukan, akan berujung pada kegagalan suatu program kegiatan yang dilakukan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap program kegiatan COREMAP masih rendah, sebagaimana tercermin pada jawaban responden. Gambaran detailnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Prosentase Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Program COREMAP Desa Tuapejat, 2007

No.	Jenis kegiatan	Prosentase Jawaban			Jumlah
		Tahu	Tidak	Tidak Menjawab	
1	Penyelamatan Terumbu Karang	52	45	3	100
2	Peningkatan Pengetahuan TK	40	13	47	100
3	Pengawasan Pesisir dan TK	38	14	48	100
4	Pembentukan LPSTK	36	16	48	100
5	Usaha Ekonomi Produktif	26	24	48	100
6	Pelatihan	29	21	50	100
7	Pendampingan	24	24	52	100
8	Rencana Pemanfaatan TK	23	25	52	100
9	Pokmas Konservasi	19	23	58	100
10	Pokmas Ekonomi Produktif	15	30	55	100
11	Pokmas Wanita	6	9	85	100
12	Pemberian Dana Bergulir	35	18	47	100
13	Pelatihan Keterampilan	21	30	49	100
14	Usaha Perdagangan Warung	-	32	68	100
15	Usaha Budidaya	26	16	58	100
16	Usaha Perikanan Tangkap	25	15	60	100
17	Ternak Ayam/Itik	5	30	65	100
18	Pembuatan Makanan Kue	10	26	64	100
19	Pengolahan Hasil Laut	11	24	65	100
20	Kerajinan Souvenir	5	27	68	100

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2005 dan 2007

Jawaban tersebut di atas menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program kegiatan COREMAP. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam dengan sejumlah informan, mengatakan bahwa berbagai program kegiatan COREMAP disusun berdasarkan usulan proposal yang disampaikan oleh LPSTK kepada DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai. Usulan tersebut pada tingkat desa dibahas dengan

melibatkan Fasilitator Desa, Pemerintah Desa, dan unsur DPD. Tanpa melalui pembahasan lebih lanjut dan kajian kelayakannya, serta masukan melalui konsultasi publik yang luas, usulan tersebut disetujui oleh DKP.

Untuk melaksanakan usulan kegiatan yang telah disetujui, masyarakat yang bermukim disekitar kantor balai desa dipersiapkan untuk membentuk kelompok masyarakat sebagai wadah kegiatan. Dalam pelaksanaannya, ternyata hampir seluruh kegiatan dilakukan oleh sejumlah aparat pemerintah DKP, pihak ke tiga Universitas Riau, Fasilitator Desa, jajaran pengurus LPSTK, dan sejumlah kecil warga masyarakat. Bahkan dalam kegiatan tertentu seperti pembuatan Daerah Perlindungan Laut, pelaksanaannya dikontrakkan pada pihak ke tiga dalam hal ini tenaga Universitas Riau.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan COREMAP hanya berkuat di sekitar Kantor Desa dan LPSTK, sehingga tidak banyak diketahui masyarakat luas. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan program COREMAP. Gambaran detailnya partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan COREMAP sesungguhnya lebih tepat disebut “mobilisasi” masyarakat melalui instruksi petugas pemerintah, atau “partisipasi semu”. Dalam pengertian “mobilisasi” tentu jelas ada unsur keterpaksaan keterlibatan seseorang di dalam suatu kegiatan. Munculnya penamaan Pokmas “Reureubaga” sangat boleh jadi mencerminkan rasa keterpaksaan tersebut. Hal seperti ini jelas merupakan paradigma lama yang tidak senafas dengan jiwa otonomi daerah. Sudah barang tentu partisipasi yang diharapkan dalam kegiatan program COREMAP adalah partisipasi aktif masyarakat yang didasari oleh motivasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu kegiatan bagi masyarakat.

Tabel 3.2.
 Persentase Keterlibatan Responden Pada Kegiatan COREMAP
 Desa Tuapejat, 2007.

No	Jenis Kegiatan	Persentase Jawaban			Jumlah
		Terlibat	Tidak	Tidak Menjawab	
1	Kesadaran Pengelolaan TK	15	25	60	100
2	Pengawasan Pesisir dan Laut	14	24	62	100
3	Pembentukan LPSTK	36	16	48	100
4	Usaha Ekonomi Produktif	10	16	74	100
5	Pelatihan	12	17	71	100
6	Pendampingan	9	15	76	100
7	Perencanaan Pemanfaatan TK	23	25	52	100
8	Pokmas Konservasi	10	9	81	100
9	Pokmas Ekonomi Produktif	6	9	85	100
10	Kredit Dana bergulir	9	29	62	100
11	Bimbingan Keterampilan	7	19	74	100
12	Kegiatan Budidaya	8	18	74	100
13	Perikanan Tangkap	9	16	75	100
14	Ternak Itik/Ayam	5	-	95	100
15	Pembuatan makanan kue	8	2	90	100
16	Pengolahan Hasil laut	11	24	65	100
17	Kerajinan Souvenir	13	2	95	100

Sumber : Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2005 dan 2007

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain pentingnya pendekatan sosial yang dilakukan. Prinsipnya masyarakat harus dijadikan subyek dan bukan obyek dari kegiatan. Untuk itu, masyarakat harus sebanyak mungkin dan sejauh mungkin dilibatkan dalam kegiatan, mulai dari perencanaan, perumusan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Dalam kegiatan pengembangan masyarakat, terkandung didalamnya aksi penyadaran masyarakat, segi pemberdayaan masyarakat, dan memberi rasa tanggungjawab terhadap apa-apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan masyarakat tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sesuatu kepada masyarakat, tetapi juga perlu menumbuhkan rasa percaya diri atas kemampuan dan rasa tanggung jawab masyarakat.

Selain pendekatan sosial tersebut, perlu juga diperhatikan factor kebutuhan yang dirasakan masyarakat akan pentingnya suatu kegiatan yang sedang dilakukan, pemahaman terhadap program yang dilakukan, penguasaan keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan terutama bagi pihak agen pembaharuan, struktur masyarakat tempat dilangsungkannya kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, serta kepemimpinan masyarakat.

Dalam kaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat, Boyle (1981) menyatakan pentingnya partisipasi, antara lain, (1) Partisipasi dari suatu warga komunitas dalam suatu kegiatan dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk mendidik warga komunitas tersebut. Hal ini penting karena akan menghasilkan pengertian, konsensus, dan keputusan yang bijaksana. (2) Partisipasi itu sendiri merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai. (3) Partisipasi itu sendiri merupakan suatu aktivitas yang digalakkan untuk mendorong lahirnya inisiatif, kreatifitas, dan kepercayaan diri. (4) keterlibatan masyarakat akan memberikan informasi yang lebih akurat tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat dan juga untuk menghindari salah konsepsi para petugas. Mengacu kepada pendapat tersebut, jelas kualitas partisipasi masyarakat Desa Tuapejat dalam kegiatan program COREMAP masih jauh dari pengertian partisipasi sebagaimana dikonsepsikan oleh Boyle.

BAB IV

PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA

Pendapatan rumah tangga dan per kapita merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan COREMAP. Pelaksanaan program diharapkan dapat meningkatkan perekonomian penduduk yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita. Secara eksplisit disebutkan salah satu indikator COREMAP adalah pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program (tahun 2009). Indikator lain adalah paling sedikit 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiary*) merasakan dampak positif program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status ekonomi mereka.

Perubahan pendapatan penduduk dalam bagian ini dilihat dari perbandingan antara pendapatan penduduk pada tahun 2005 (t0) dan tahun 2007 (t1). Perubahan pendapatan penduduk disajikan mulai dari perubahan secara umum, kemudian terfokus pada perubahan pendapatan dari kegiatan kenelayanan. Perubahan pendapatan secara umum belum dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan COREMAP karena ada sebagian penduduk yang bekerja di luar pekerjaan berbasis terumbu karang. Penghitungan pendapatan dalam penelitian ini masih berdasarkan harga yang berlaku, sehingga penjelasan tentang perubahan pendapatan penduduk akan dihubungkan dengan laju inflasi, maupun tingkan upah di daerah setempat.

4.1. PENDAPATAN PENDUDUK

Secara umum selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan pendapatan penduduk sebesar 52,62 persen di desa Tuapejat.

Peningkatan pendapatan ini lebih tinggi daripada laju inflasi di daerah yaitu 19,03 persen tahun 2005 dan 7,81 persen tahun 2006. Meskipun demikian terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antara pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah, sehingga terdapat masalah pemerataan pendapatan penduduk di desa tersebut. Terjadinya perkembangan pendapatan minimum yang negative menunjukkan terjadinya kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dan miskin. Peningkatan pendapatan hanya dinikmati oleh oleh sebagian penduduk yang memiliki akses pengelolaan sumber daya yang tinggi. Peningkatan pendapatan perkapita ini lebih disebabkan oleh kegiatan ekonomi di luar COREMAP seperti perdagangan dan jasa mengingat Tuapejat merupakan ibukota Kabupaten Mentawai. Berdasar informasi di lapangan, kegiatan COREMAP belum memberikan keuntungan apapun bagi masyarakat termasuk peningkatan pendapatan. Mata pencaharian alternative yang dibiayai COREMAP baru dilakukan dalam beberapa bulan terakhir sehingga belum ada dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

Peningkatan aktivitas perekonomian berdampak pada semakin bervariasinya sumber penghasilan rumah tangga sehingga terjadi peningkatan pendapatan sebesar 23,65 persen selama tahun 2005-2007. Akan tetapi peningkatan pendapatan ini masih berada di bawah laju inflasi (26,84 persen), sehingga pada dasarnya pendapatan rumah tangga di Tuapejat hampir sama bahkan mengalami penurunan. Dalam dua tahun terakhir berbagai proyek pembangunan infrastruktur sedang dilakukan dan secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk. Berdirinya Kabupaten Mentawai juga berdampak pada kesempatan kerja di sector jasa terutama jasa public (pemerintahan). Pendapatan penduduk yang bekerja di sector jasa tersebut cukup tinggi, sehingga berdampak pada kondisi perekonomian secara umum. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan 1\$ US, pendapatan perkapita penduduk mentawai sudah berada di atas garis kemiskinan. Akan tetapi jika menggunakan garis kemiskinan sebesar 1 \$ US pendapatan perkapita tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 4.1
 Statistik Pendapatan Penduduk per Bulan
 di Desa Tuapejat, Mentawai tahun 2005 dan 2007

Pendapatan	Jumlah (rupiah)		Perkembangan (%)
	Tahun 2005	Tahun 2007	
Per kapita	243.877	372.194	52,62
Rata-rata rumah tangga	1.113.596	1.376.970	23,65
Median	866.667	900.000	3,85
Minimum rumah tangga	87.500	12.500	-85,71
Maksimum rumah tangga	5.866.667	8.000.000	36,36

Sumber : Data Primer, Survei Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia tahun 2005 dan 2007

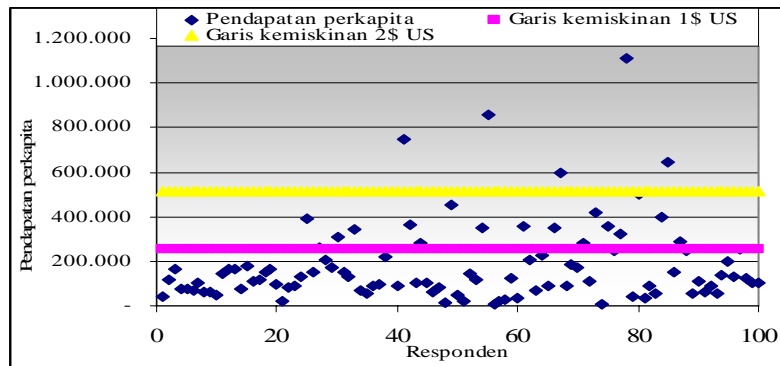
Data penelitian menunjukkan terdapat range/ jarak antara pendapatan minimum dan maksimum rumah tangga yang lebih besar dibandingkan dengan pada tahun 2005. Kondisi ini dapat menjadi indikasi adanya perbedaan pendapatan yang semakin besar antara penduduk kaya dan miskin. Peningkatan pendapatan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara penduduk yang lain tidak dapat menikmatinya. Pendapatan tinggi umumnya dimiliki oleh mereka yang bekerja di sektor jasa (PNS), pedagang, maupun wiraswasta. Sementara itu pendapatan rendah pada umumnya terdapat pada mereka yang bekerja sebagai petani, nelayan, tenaga kasar dan honorer. Jika tidak segera diatasi kesenjangan pendapatan dapat menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat. Peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya harus ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Peningkatan pendapatan yang cukup tinggi di Desa Tuapejat belum dapat memberikan dampak yang berarti bagi penurunan proporsi penduduk miskin di daerah setempat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (1\$ US maupun 2\$ US per hari). Berdasar garis kemiskinan 1\$ US⁴ per hari besarnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 77 persen. Apabila garis kemiskinan

⁴ Penghitungan ini menggunakan asumsi 1\$ US = Rp 9.155,-

ditingkatkan menjadi 2\$ US per hari, penduduk miskin di Tuapejat menjadi 96 persen. Angka kemiskinan tersebut sangat besar dan lebih besar dibandingkan dengan kemiskinan secara nasional maupun kemiskinan tingkat provinsi dengan batasan garis kemiskinan yang sama. Melihat angka kemiskinan yang besar tersebut, program pembangunan yang selama ini dijalankan di Mentawai belum dapat menurunkan angka kemiskinan. Program COREMAP sebenarnya merupakan salah satu program yang memiliki nilai strategis, sebab program ini mengarah langsung ke daerah terpencil dan tertinggal. Sangat disayangkan karena selama ini program belum dapat berjalan sesuai dengan harapan, sehingga belum dapat memperbaiki taraf kehidupan masyarakat.

Diagram 4.1
Pendapatan Perkapita Penduduk Tuapejat,
Garis Kemiskinan 1\$ dan 2 \$ US



Sumber : Data Primer, Survei Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia, tahun 2007

Distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk yang mempunyai pendapatan terendah (Rp 500 ribu). Meskipun demikian perubahan pendapatan penduduk tersebut tampaknya tidak besar karena sebagian besar bergeser pada tingkatan di atasnya (antara Rp 500 rb- 999 rb) yang masih termasuk dalam kelompok pendapatan rendah. Dengan memperhatikan tingkat inflasi yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2005 dan 2006, dapat dikatakan tidak ada

perubahan proporsi penduduk yang berpendapatan rendah. Fakta ini memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa perubahan pendapatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang berpendapatan tinggi, sehingga terjadi kesenjangan pendapatan penduduk yang cukup tinggi. Proporsi rumah tangga yang berpendapatan rendah (< 1 juta) antara tahun 2005 dan 2007 hampir sama (55,8 persen dan 54,8 persen) yang menunjukkan tidak adanya penurunan proporsi rumah tangga yang mempunyai penghasilan rendah. Rumah tangga yang masuk dalam kelompok pendapatan ini berasal dari pekerja kasar/tukang angkut barang di pelabuhan, nelayan tradisional, petani, dan pegawai honorer.

Tabel 4.2
Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan

Kelompok Pendapatan	Persentase	
	Tahun 2005	Tahun 2007
< 500.000	33.7	25.3
500 rb - 999 rb	22.1	29.5
1.000.000 – 1.499.999	23.1	14.7
1.500.000 – 1.999.999	6.7	11.6
2.000.000 – 2.499.999	6.7	9.5
2.500.000 – 2.999.999	1.0	1.1
3.000.000 – 3.499.999	1.0	1.1
>/ 3.500.000	5.9	7.4

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, tahun 2005 dan 2007

Rumah tangga di Tuapejat yang mempunyai pendapatan tinggi (>3,5 jt per bulan), mengalami peningkatan dari 5,9 persen pada tahun 2005 menjadi 7,4 persen pada tahun 2007. Rumah tangga yang termasuk dalam kelompok pendapatan tertinggi ini berasal dari mereka yang bekerja di sector jasa, perdagangan, dan pensiunan. Salah satu kasus rumah tangga berpendapatan tinggi terdapat pada rumah tangga yang mempunyai beberapa anggota rumah tangga yang bekerja di sector jasa (PNS). Kombinasi pendapatan ART tersebut cukup tinggi sehingga total pendapatan rumah tangga masuk dalam kelompok rumah tangga berpenghasilan tinggi. Rumah tangga yang

lain hanya mempunyai 1 orang ART yang bekerja yaitu di sector perdagangan (toko kelontong) dan sebagai kontraktor bangunan. Pendapatan dari sector perdagangan ini cukup tinggi (Rp 5 juta/bl), sehingga masuk dalam kelompok pendapatan tinggi. Di samping itu, ada rumah tangga yang hanya memiliki satu sumber penghasilan dengan posisi yang strategis (sebagai elit daerah seperti DPRD, ketua KPU dan PNS senior) yang memiliki penghasilan di atas Rp 3,5 juta per bulan.

4.1.1. Pendapatan Per Bulan Menurut Lapangan Pekerjaan

Pendapatan rumah tangga menurut lapangan pekerjaan dapat digunakan untuk melihat ralitas perkembangan pendapatan rumah tangga pada pekerjaan berbasis terumbu karang dan pekerjaan yang lain. Data hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan pendapatan negative rumah tangga yang lapangan pekerjaan utamanya perikanan laut (-12,7 persen) dan industri (-35,99 persen). Perikanan laut merupakan lapangan pekerjaan yang secara langsung tergantung pada terumbu karang, sehingga program COREMAP ternyata belum dapat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya yang mempunyai pekerjaan berbasis terumbu karang. Hal ini dapat dimaklumi karena dari sisi input/ masukan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, program tersebut baru memberikan bantuan dana selama dua bulan terakhir sehingga belum berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Beberapa input teknologi sebenarnya telah diujicoba di daerah ini, tetapi selama ini masih mengalami kegagalan. Percobaan budidaya kepiting, kerapu, pembuatan makanan dan beberapa usaha mata pencaharian alternative telah dilakukan oleh pokmas dan pemerintah daerah tetapi semuanya mengalami kegagalan, sehingga selama ini belum ada masukan/input tehnologi yang disumbangkan COREMAP pada masyarakat.

Keterbatasan sumber daya manusia tampaknya menjadi kendala utama bagi pelaksanaan COREMAP di daerah terbukti tidak ada inovasi teknologi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Perkembangan negative pada

pendapatan rumah tangga yang bekerja di perikanan laut sebesar -12,7 persen merupakan perkembangan yang sangat memprihatinkan karena pertumbuhan tersebut belum memperhatikan factor inflasi di daerah yang mencapai 19,03 persen tahun 2005 dan 7,81 persen tahun 2006. Dengan memperhitungkan tingkat inflasi di daerah, penurunan pendapatan rumah tangga di sector perikanan tangkap akan mencapai -38 persen. Suatu penurunan pendapatan yang sangat fantastis mengingat di daerah ini telah dilakukan beberapa program untuk meningkatkan pendapatan masyarakat seperti COREMAP dan PEMP. Hal ini berbeda dengan penemuan yang dilakukan pada studi sosial ekonomi yang dilakukan oleh CRITIC daerah Mentawai, 2006 bahwa terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan dibandingkan dengan pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Secara eksplisit studi tersebut menyebutkan pendapatan nelayan pada tahun 2006 sekitar Rp 900 ribu – Rp 1,5 juta.

Penurunan pendapatan rumah tangga yang bekerja di perikanan laut salah satunya disebabkan oleh semakin berkurangnya populasi ikan di laut, sementara jumlah penduduk yang mencari ikan tidak berubah bahkan mengalami peningkatan. Penurunan populasi ikan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat selama 5 tahun terakhir yang disebabkan oleh penggunaan potassium maupun bom ikan, serta pengambilan karang yang berdampak pada rusaknya terumbu karang sebagai rumah ikan. Populasi ikan yang sedikit menyebabkan jumlah tangkapan nelayan semakin menurun bahkan pada musim tidak ada ikan, nelayan harus merugi karena hasil tangkapannya tidak dapat menutup biaya operasional. Teknologi penangkapan ikan yang tidak mengalami perkembangan tampaknya juga menjadi factor rendahnya pendapatan nelayan. Teknologi yang selama ini digunakan nelayan menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dengan nelayan dari luar daerah mentawai dalam penangkapan ikan di laut. Daerah tangkapan nelayan tahun 2005 sampai 2007, tidak mengalami perubahan karena daerah tangkapan tersebut sebenarnya masih menyimpan potensi ikan yang cukup besar, terbukti banyak nelayan dari luar yang menangkap ikan di daerah Mentawai.

Tabel 4.3
Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Menurut Lapangan Pekerjaan
KRT di Desa Tuapejat, Mentawai

Lapangan pekerjaan	Jumlah (rupiah)		Perkembangan (%)
	Tahun 2005	Tahun 2007	
Perikanan laut	1.094.904	955.825	-12,70
Pertanian pangan	820.250	1.010.810	23,23
Pertanian tanaman keras	787.137	1.051.543	33,59
Perdagangan	1.195.303	1.735.333	45,18
Jasa	1.647.817	1.930.214	17,14
Industri	841.666	538.750	-35,99
Bangunan	1.103.285	1.750.000	58,62

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia tahun 2005 dan 2007

Pendapatan terendah rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di perikanan laut sebesar Rp 83.333,- yaitu nelayan pancing. Nelayan ini mengaku pada waktu musim gelombang lemah ia masih dapat penghasilan bersih sekitar Rp 800 ribu perbulan, tetapi pada waktu musim gelombang kuat dan pancaroba ia merugi karena nilai hasil tangkapan lebih rendah dari biaya operasional melaut. Meskipun demikian pada waktu gelombang kuat dan pancaroba itu ia tetap melaut dengan jumlah hari melaut lebih sedikit, karena tidak ada alternative pekerjaan lain yang dimiliki. Pendapatan tertinggi rumah tangga yang bekerja di perikanan tangkap sebesar Rp 3,9 juta/bulan dimiliki oleh seorang nelayan pancing sendiri dan juga bekerja sebagai operator board. Pendapatan dari perikanan tangkap sangat kecil (Rp 400 ribu/ bulan), sementara pendapatan dari luar sector perikanan sebesar Rp 3,5 juta/bulan.

Pendapatan rumah tangga yang KRT-nya bekerja di pertanian tanaman pangan mengalami peningkatan sebesar 23,23 persen dibandingkan dengan tahun 2005. Akan tetapi dengan memperhatikan inflasi di daerah yang mencapai 26,84 persen selama dua tahun tersebut, peningkatan pendapatan petani menjadi kurang bermakna. Jika digunakan harga yang berlaku pada tahun 2005, justru terjadi

penurunan pendapatan karena perkembangan pendapatan lebih kecil dari laju inflasi di daerah. Selisih antara pendapatan tertinggi dan terendah di pertanian tanaman pangan pada tahun 2007 ternyata cukup tinggi (pendapatan terendah sebesar Rp 21.000 per bulan sementara pendapatan tertinggi sebesar Rp 1,01 juta per bulan). Pendapatan terendah terdapat pada petani gurem dan tidak mempunyai pekerjaan sambilan dan tidak ada ART lain yang bekerja. Sumber mata pencaharian hanya mengandalkan dari pekerjaan sektor pertanian tanaman pangan. Sementara itu pendapatan tertinggi terdapat pada rumah tangga yang mempunyai mata pencaharian pertanian tanaman pangan tetapi ada pekerjaan lain selain pekerjaan utama tersebut yaitu sebagai nelayan. Selain itu, ada ART lain yang bekerja di rumah tangga tersebut sehingga nominal pendapatan rumah tangga menjadi tinggi.

Peningkatan pendapatan per bulan terjadi pada lapangan pekerjaan perdagangan dan bangunan masing-masing 45 persen dan 59 persen (lebih besar dibandingkan dengan inflasi selama 2 tahun terakhir). Omset perdagangan di Tuapejat meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan untuk pembangunan di daerah. Selain itu rumah tangga yang memiliki pekerjaan pokok dari perdagangan dan bangunan tersebut biasanya memiliki sumber mata pencaharian lain di luar sector perdagangan. Rata-rata pendapatan di sektor perdagangan pada tahun 2005 sebesar Rp 1,2 juta dan meningkat menjadi Rp 1,7 juta (45 persen) pada tahun 2007. Perbedaan pendapatan yang tinggi antara pendapatan minimum dan maksimum rumah tangga juga terjadi di sector perdagangan pada tahun 2007 (minimum Rp 530 ribu dan maksimum Rp 5,7 juta). Pendapatan di sektor perdagangan tergantung pada jenis barang yang diperdagangkan dan nilai investasi yang telah dilakukan. Pedagang kecil yang mempunyai modal kecil juga mempunyai pendapatan yang kecil dan sebaliknya pemilik modal besar akan menguasai sebagian besar pasar barang sehingga mempunyai pendapatan yang besar.

Tabel 4.4
Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Menurut
Jenis Pekerjaan KRT di Desa Tuapejat, Mentawai

Jenis pekerjaan	Jumlah (rupiah)		Perkembangan (%)
	Tahun 2005	Tahun 2007	
Nelayan	1.094.904	955.825	-12,70
Petani tanaman pangan	820.250	1.010.810	23,23
Petani tanaman keras	787.137	1.051.543	33,59
Tenaga jasa	1.711.829	2.120.744	23,89
Tenaga industri	841.666	535.833	-36,34
Tenaga penjualan	1.195.303	1.693.333	41,67
Tenaga kasar	860.364	450.000	-47,70

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia tahun 2005 dan 2007

Data dari BPS menunjukkan rata-rata upah pekerja di Indonesia pada pebruari 2006 sebesar Rp 760 ribu/bulan dan di Sumatera Barat sebesar Rp 798 ribu/ bulan. Berdasar nilai kedua upah tersebut terdapat dua sektor yang tenaga kerjanya mempunyai upah di bawah rata-rata propinsi yaitu tenaga industri dan tenaga kasar. Pendapatan rumah tangga di kedua sektor juga mengalami penurunan dibandingkan pendapatan tahun 2005. Penurunan ini dapat terjadi karena adanya perubahan struktur tenaga kerja di rumah tangga, dimana terjadi penurunan jumlah ART yang bekerja. Selain itu ada kemungkinan terjadi penurunan upah pekerja kasar, karena jumlah pekerja yang terlalu banyak atau volume pekerjaan yang semakin kecil.

4.1.2. Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim

Data hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan jumlah rumah tangga yang mempunyai pendapatan dari sektor kenelayanan yaitu 34 persen pada tahun 2005 menjadi 36 persen pada tahun 2007. Dari rumah tangga tersebut proporsi pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan terhadap total pendapatan rumah tangga juga meningkat dari 66 persen pada tahun 2005 menjadi 75

persen. Peningkatan proporsi pendapatan dari kegiatan kenelayanan ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan yaitu : (1) terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga di sektor kenelayanan sementara total pendapatan rumah tangga cenderung tetap atau menurun. Dengan demikian, peran kegiatan kenelayanan dalam rumah tangga menjadi semakin besar sebagai tumpuan ekonomi rumah tangga tetapi perekonomian rumah tangga tidak mengalami peningkatan. (2) pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan tetap, sementara total pendapatan rumah tangga mengalami penurunan. Oleh sebab itu, kondisi ekonomi rumah tangga menjadi semakin rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (3) pendapatan dari kenelayanan maupun total pendapatan rumah tangga mengalami peningkatan, tetapi laju peningkatan pendapatan dari kegiatan kenelayanan lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan. Dalam kondisi seperti ini, perekonomian rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. (4) pendapatan dari kegiatan kenelayanan dan total pendapatan rumah tangga mengalami penurunan, tetapi penurunan total pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan kegiatan kenelayanan. Berdasar data pendapatan rumah tangga nelayan dapat dilihat bahwa terjadi penurunan total pendapatan rumah tangga sementara pendapatan dari kegiatan kenelayanan mengalami peningkatan.

Tabel 4.5.
Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan

Pendapatan	Jumlah (Rupiah)		Perkembangan (%)
	Tahun 2005	Tahun 2007	
Per Kapita	104,601	156,905	50,00
Rata-rata rumah tangga	536,326	610,017	13,74
Median	310,333	654,125	110,78
Minimum rumah tangga	40,000	83,333	108,33
Maksimum rumah tangga	3,885,000	1,558,333	-59,89

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia tahun 2005 dan 2007

Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 50 persen untuk pendapatan perkapita dan 14 persen untuk pendapatan rumah tangga.

Persentase peningkatan pendapatan per kapita cukup tinggi sehingga lebih besar dari angka inflasi pada tahun yang sama. Akan tetapi pendapatan perkapita penduduk di daerah ini masih lebih kecil dari garis kemiskinan 1 \$ US sehingga secara rata-rata penduduk termasuk dalam kategori miskin. Hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan dari kegiatan kenelayanan tidak diikuti oleh pendapatan di luar sector kenelayanan. Oleh sebab itu total pendapatan rumah tangga yang bekerja di sector kenelayanan tidak mengalami perubahan bahkan semakin rendah. Mata pencaharian di luar sector kenelayanan selama ini memang cukup penting mengingat hampir 50 persen nelayan di Mentawai juga bekerja di sektor yang lain (Kabupaten Mentawai Dalam Angka, 2005).

Perkembangan pendapatan dari kegiatan kenelayanan bervariasi menurut musim gelombang lemah, pancaroba, dan gelombang kuat (Tabel 4.6). Rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada musim gelombang lemah menurun sekitar (3,78 persen), sementara pendapatan per kapita meningkat sebesar 24,65 persen. Peningkatan pendapatan per kapita dalam kondisi pendapatan rumah tangga yang menurun dapat terjadi karena adanya penurunan jumlah ART. Pada waktu musim gelombang lemah ini selisih antara pendapatan minimum dan maksimum pada tahun 2007 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2005. Hal ini berhubungan dengan kesenjangan pendapatan antara nelayan kaya dan miskin yang semakin rendah. Meskipun demikian, jarak antara pendapatan terendah dengan tertinggi masih cukup besar (150 ribu : 3 juta), hal ini mungkin berkaitan dengan teknologi dan wilayah penangkapan ikan.

Pada waktu musim pancaroba, rata-rata pendapatan rumah tangga meningkat sekitar 34,52 persen dan pendapatan perkapita juga meningkat (88,72 persen). Meskipun demikian, pendapatan pada waktu musim pancaroba ini masih sangat kecil dan berada di bawah garis kemiskinan. Pendapatan rumah tangga dan perkapita hanya separuh dari pendapatan pada waktu musim gelombang lemah. Musim ini juga ditandai dengan adanya rumah tangga yang mengalami kerugian karena hasil tangkapan mereka tidak dapat digunakan untuk menutup biaya operasional. Beberapa nelayan

mengaku tetap melaut meskipun mereka merugi dengan harapan hasil tangkapan dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika tetap mengalami kerugian, rumah tangga tersebut dapat menutup kebutuhan rumah tangga dari kegiatan ART lain di luar sektor perikanan, atau berhutang pada tetangga.

Tabel 4.6.
Statistik Pendapatan Rumah Tangga (RT) dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim di Desa Tuapejat, Mentawai (Rp)

Pendapatan	Tahun		Perkembangan (%)
	2005	2007	
Gel lemah			
Per kapita	239.337	298.344	24,65
Rata-rata RT	1.199.319	1.154.000	-3,78
Median	700.000	1.325.000	89,29
Minimum RT	120.000	150.000	25,00
Maksimum RT	7.140.000	3.000.000	-57,98
Pancaroba			
Per kapita	67.792	127.935	88,72
Rata-rata RT	358.156	481.806	34,52
Median	196.000	500.000	155,10
Minimum RT	-225.000	-700.000	-211,11
Maksimum RT	3.570.000	2.000.000	-43,98
Gel Kuat			
Per kapita	39.489	32.527	-17,63
Rata-rata RT	160.660	138.393	-13,86
Median	162.500	150.000	-7,69
Minimum RT	-695.000	-280.000	59,71
Maksimum RT	945.000	420.000	-55,56

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia tahun 2005 dan 2007

Penurunan rata-rata pendapatan rumah tangga dan perkapita nelayan terjadi pada musim gelombang kuat. Pada waktu musim gelombang kuat, pendapatan dari kegiatan kenelayanan sangat kecil bahkan pendapatan maksimum rumah tangga hanya Rp 420 ribu sementara pada waktu musim gelombang lemah mencapai Rp 3 juta. Faktor musim tampaknya menjadi kendala yang sampai saat ini belum dapat diatasi oleh nelayan, sehingga diperlukan alternatif pekerjaan selain menangkap ikan di laut. Kegiatan alternatif ini sebenarnya sudah dijalani oleh penduduk di Tuapejat, terbukti pada waktu rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan musim gelombang kuat hanya sebesar Rp. 138 ribu, total pendapatan

rumah tangga sebesar Rp 519 ribu (lampiran 4.2). Hal yang sama terjadi pada waktu musim pancaroba, dimana rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan hanya sebesar Rp 481 ribu, sementara rata-rata total pendapatan rumah tangga mencapai Rp 921 ribu. Kondisi ini menunjukkan peran pendapatan rumah tangga di luar kegiatan kenelayanan yang lebih besar dibandingkan dari kegiatan kenelayanan terutama pada waktu musim pancaroba dan sulit ikan.

4.2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN

Pendapatan rumah tangga dan perkapita di Tuapejat selama dua tahun terakhir (2005-2007) secara umum mengalami peningkatan sebesar 52,6 persen dan 23,7 persen. Meskipun demikian jika dikontrol dengan inflasi di daerah, pendapatan perkapita mengalami perkembangan negatif karena selama dua tahun tersebut terjadi inflasi sebesar 26,8 persen. Khusus untuk rumah tangga yang KK-nya bekerja sebagai nelayan terjadi penurunan pendapatan selama dua tahun terakhir tanpa dikontrol inflasi (Tabel 4.3). Proporsi pendapatan rumah tangga di Tuapejat dari kegiatan kenelayanan terhadap total pendapatan rumah tangga meningkat dari 66 persen pada tahun 2005 menjadi 75 persen pada tahun 2007. Secara umum perubahan pendapatan ini dihubungkan dengan berbagai faktor internal rumah tangga yaitu sumber pendapatan, teknologi alat tangkap/ produksi dan wilayah tangkap, biaya produksi dan kualitas SDM.

4.2.1. COREMAP dan Program Pemerintah lainnya

Program-program pembangunan yang secara spesifik ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir seperti COREMAP dan PEMP ternyata belum dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tuapejat. Hal ini berhubungan langsung dengan tidak berjalannya program-program pembangunan tersebut. COREMAP misalnya selama beberapa tahun terakhir memiliki beberapa program ekonomi produktif yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti

budidaya kepiting, kerapu, bantuan mesin, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan terumbu karang. Akan tetapi berbagai program yang dirancang tersebut belum ada yang berhasil. Bukan peningkatan pendapatan masyarakat yang didapat, tetapi masyarakat semakin tergantung oleh bantuan sehingga kemandirian masyarakat dapat luntur. Program-program lain yang sebenarnya menggunakan dana bantuan luar negeri juga tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di pesisir. Kurangnya perencanaan program dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten menjadi penyebab utama kegagalan program pembangunan ini. Tidak adanya pengelolaan program yang profesional menjadi penyebab utama tidak berhasilnya program pembangunan yang ada di daerah.

Program pembangunan fisik di daerah saat ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti halnya masyarakat yang bekerja di konstruksi dan perdagangan (tabel 4.3). Program pembangunan fisik juga menjadi salah satu pendorong tingginya pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pada tahun 1997-2003 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen sementara Sumatera Barat hanya 2,33 persen (Bappeda Kab Mentawai, 2004). Rumah tangga yang bekerja di kedua sektor ini mengalami peningkatan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor yang lain. Akan tetapi pembangunan fisik tersebut tampaknya hanya akan memberikan dampak jangka pendek karena begitu proyek habis atau bangunan rusak, dampak pembangunan tidak akan dirasakan lagi oleh masyarakat. Pembangunan fisik di Tuapejat dalam beberapa tahun terakhir memang cukup besar mengingat daerah ini merupakan ibukota kabupaten Mentawai. Meskipun demikian pembangunan fisik yang tidak diimbangi oleh peningkatan sumberdaya manusia tampaknya akan menjadi persoalan tersendiri bagi Mentawai di kemudian hari. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembangunan fisik di daerah sudah sepatutnya dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk penciptaan berbagai teknologi yang dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

4.2.2. Faktor Internal

Dalam hal sumber pendapatan, peningkatan proporsi pendapatan dari kegiatan kenelayan terhadap total pendapatan dari 66 persen pada tahun 2005 menjadi 75 persen pada tahun 2007 menunjukkan kegiatan kenelayan dalam rumah tangga mempunyai peran yang lebih tinggi dalam ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu, sumber pendapatan alternatif di Tuapejat selama ini belum meningkat dalam arti tidak ada sumber alternatif yang berkembang selama dua tahun terakhir. Berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik di Kabupaten Mentawai memang sedang digalakkan, tetapi kegiatan tersebut rupanya belum dapat digunakan untuk memberikan sumber pendapatan alternatif bagi rumah tangga nelayan. Tidak berjalannya berbagai kegiatan yang diprogramkan oleh COREMAP juga menjadi sebab mengapa mata pencaharian alternatif belum dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan.

Berkaitan dengan teknologi alat tangkap dan wilayah penangkapan, selama dua tahun terakhir belum ada perubahan berarti dalam pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut. Perubahan teknologi hanya akan terjadi jika ada masukan atau inovasi teknologi yang dilakukan oleh pihak luar maupun dari nelayan. Selama ini pihak COREMAP maupun nelayan belum dapat membuat inovasi teknologi produksi/ penangkapan karena keterbatasan sumber daya manusia. Beberapa teknologi seperti budidaya kepiting dan kerapu telah diuji coba di Tuapejat, tetapi tidak berhasil. Demikian pula usaha perluasan wilayah tangkap dengan peningkatan kapasitas mesin yang baru dilakukan dalam beberapa bulan tetapi belum memberikan dampak yang berarti bagi nelayan. Tidak adanya program yang terintegrasi dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah menyebabkan terhambatkan inovasi teknologi produksi baik budidaya maupun penangkapan.

Perubahan biaya produksi melaut lebih disebabkan oleh peningkatan bahan bakar mesin maupun bahan lain yang diperlukan dalam melaut bukan pada kuantitas material yang diperlukan.

Peningkatan harga BBM yang terjadi beberapa tahun yang lalu menjadi factor utama peningkatan biaya produksi melaut. Rata-rata biaya produksi sekali melaut pada tahun 2007 mencapai Rp 54 ribu pada waktu musim gelombang tenang dan Rp 41 ribu pada waktu musim gelombang kuat. Biaya produksi pada waktu musim gelombang tenang lebih tinggi daripada gelombang kuat sebab waktu dan areal melaut nelayan lebih besar. Meskipun demikian, ikan yang didapat biasanya juga lebih banyak sehingga nelayan masih untung. Berbeda halnya dengan musim gelombang kuat, sebagian nelayan mengaku justru merugi jika harus melaut. Akan tetapi sebagian nelayan mengaku tidak mempunyai alternative pekerjaan yang lain sehingga mereka terpaksa terus melaut sambil menunggu keberuntungan untuk mendapatkan ikan yang lebih besar.

4.2.3. Faktor Eksternal

Perubahan pendapatan juga berkaitan dengan factor eksternal seperti pemasaran (harga dan akses), permintaan terhadap hasil tangkapan/produksi, iklim dan degradasi sumber daya pesisir. Musim/iklim merupakan factor alam yang hampir tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir yang dikenal dengan musim gelombang kuat, lemah dan pancaroba. Perubahan iklim berdampak pada volume dan produksi ikan di laut sehingga berdampak langsung pada tingkat pendapatan nelayan. Musim gelombang kuat merupakan musim yang kurang bersahabat bagi nelayan karena banyak nelayan yang tidak dapat melaut sehingga tidak mendapatkan ikan. Nelayan yang mempunyai pekerjaan sampingan akan bekerja sesuai dengan pekerjaan sampingan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan nelayan yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan melakukan persiapan seperti memperbaiki alat tangkap yang dimiliki.

Harga dan akses pasar ikan di Mentawai (Tuapejat) selama dua tahun terakhir juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Peningkatan harga jual ikan di tingkat nelayan lebih menyesuaikan laju inflasi setempat sehingga jika dikontrol dengan laju inflasi harga ikan tersebut relative sama. Dalam hal ini tidak ada perubahan harga jual ikan yang dapat berdampak positif pada peningkatan

kesejahteraan nelayan. Akses pasar nelayan di Tuapejat juga tidak mengami perubahan yang berarti selama dua tahun terakhir. Nelayan di Tuapejat biasa menjual hasil tangkapan pada pengumpul di tingkat desa dengan harga yang telah ditentukan oleh pengumpul. Beberapa minggu kemudian pengumpul ini menjual ikan ke pedangan di tingkat propinsi untuk kemudian di teruskan kepada konsumen atau pedagang di daerah-daerah lain.

Degradasi sumber daya pesisir dan laut tampaknya menjadi factor eksternal yang cukup dirasakan oleh nelayan di Tuapejat. Beberapa tahun yang lalu jumlah ikan di perairan sekitar Tuapejat masih cukup banyak, tetapi saat ini terjadi penurunan yang signifikan. Praktek pengambilan karang dan pasir di laut yang selama ini dilakukan oleh sebagian warga menjadi factor utama terjadinya degradasi sumber daya pesisir dan laut. Penggunaan bom oleh nelayan dari luar maupun potassium yang dilakukan oleh nelayan local juga menjadi pemicu utama perusakan terumbu karang. Kegagalan budidaya kepiting yang dilakukan warga salah satunya juga dipengaruhi oleh berkurangnya ikan laut yang rencananya akan digunakan sebagai makanan kepiting. Daerah perlindungan laut yang telah dibuat oleh COREMAP juga tidak dapat jalan karena banyak dilanggar oleh warga karena kurangnya sosialisasi di tingkat masyarakat. Hal positif yang perlu diakui adalah terjadi penurunan penambangan pasir dan batu karang di Tuapejat karena adanya larangan pengambilan karang yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Penelitian BME ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi obyektif tentang program COREMAP yang telah dilakukan di Desa Tuapejat pada pertengahan tahun 2007. Dengan adanya hasil penelitian empirik ini telah menjadi bahan monitoring tentang jalannya program tersebut, sehingga merupakan masukan konsep substansi yang perlu diperhatikan secara serius untuk memperbaiki kinerja yang diharapkan akan menimbulkan dampak positif sampai berakhirnya program pada tahun 2009.

Penelitian yang dilakukan oleh staf peneliti LIPI menunjukkan bahwa kondisi obyektif masyarakat di Tuapejat telah mengalami kemajuan disamping masih mengalami banyak kendala. Atas dasar uraian tentang indikator pemilikan aset rumah tangga, secara umum telah menunjukkan kemajuan. Dalam hal indikator pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita, berdasar harga berlaku selama dua tahun terakhir (2005-2007) secara umum juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 52,6 persen dan 23,7 persen. Meskipun demikian jika data tersebut dikontrol dengan inflasi di daerah, pendapatan perkapita mengalami perkembangan negatif karena selama dua tahun terakhir telah terjadi inflasi sebesar 26,8 persen. Dengan demikian peningkatan pendapatan per kapita belum mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Peningkatan pendapatan terjadi pada beberapa lapangan pekerjaan yaitu jasa, konstruksi dan perdagangan. Peningkatan aset dan pendapatan rumah tangga tersebut terkait erat dengan pembangunan di daerah sejalan dengan perubahan status sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Khusus untuk rumah tangga nelayan (berbasis terumbu karang) telah terjadi penurunan pendapatan selama kurun waktu dua

tahun terakhir yaitu sebesar -12,7 persen tanpa dikontrol inflasi. Oleh sebab itu, kesejahteraan rumah tangga nelayan mengalami penurunan drastis seiring terjadinya inflasi yang cukup tinggi. Penurunan pendapatan nelayan ini terkait erat dengan faktor internal dan eksternal, serta faktor struktural. Dengan kata lain program COREMAP belum mampu meningkatkan kesejahteraan, karena semua kegiatan belum berjalan sesuai dengan kaidah konsep pemberdayaan masyarakat.

5.2. REKOMENDASI

Bertolak dari tujuan dan hasil penelitian empirik, beberapa solusi yang dapat direkomendasikan antara lain sebagai berikut :

- (1) Perlunya mengubah paradigma dalam merumuskan program kegiatan COREMAP dengan mengedepankan azas partisipatif luas masyarakat. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat, memperoleh komitmen masyarakat, menggali swadaya masyarakat, menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat, serta memperoleh dukungan masyarakat. Selama ini pelaksanaan COREMAP masih bias proyek yang bersifat “top down”.
- (2) Dibutuhkan peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan COREMAP melalui peningkatan kemampuan SDM aparat pelaksana, keterbukaan manajemen administrasi keuangan. Dengan kalimat sederhana bahwa kegiatan COREMAP ditekankan pada rasa tanggung jawab yang lebih mengedepankan kepentingan pembangunan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
- (3) Dalam melakukan kegiatan COREMAP, segi pembelajaran melalui kegiatan pilot proyek atau demonstrasi pilot yang bersekala kecil jauh lebih penting, dari pada mengejar target proyek yang terlalu banyak kegiatan sehingga tidak fokus. Dengan kegiatan demplot ini, tekanan kegiatan lebih diprioritaskan pada peningkatan penguasaan keterampilan bidang-bidang kegiatan yang diprogramkan. Hal ini

dimaksudkan agar mempercepat proses alih pengetahuan dan teknologi. Kelebihan dari kegiatan skala kecil ini adalah percepatan proses difusi atau penyebaran pembaharuan kepada masyarakat melalui proses imitasi (peniruan) atas keberhasilan kegiatan tersebut. Hal ini sekaligus akan memperbaiki citra kinerja aparat yang terlibat dalam kegiatan COREMAP karena kegiatan yang ada telah dipersiapkan secara matang. Kegiatan demplot juga akan memperkecil resiko kegagalan pada tahap implementasi di tingkat masyarakat.

- (4) Perlunya penguatan kelembagaan dalam bentuk penyusunan Perda sebagai pijakan hukum dalam kaitan upaya penyelamatan ekosistem terumbu karang. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul keraguan lagi baik dikalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat, perlu dieksplisitkan pasal-pasal yang menyangkut pelarangan kegiatan pengambilan terumbu karang, penambangan pasir laut, penebangan mangrove, pemboman, dan penggunaan potassium/racun sianida. Penguatan kelembagaan juga menyangkut peningkatan kemampuan managerial jajaran pengurus LPSTK, fasilitator desa, dan Pokmas. Hal ini penting, karena kegiatan COREMAP bertumpu pada kegiatan kelompok. Hasil studi menunjukkan bahwa kemampuan berorganisasi serta keterampilan penguasaan bidang-bidang kegiatan yang diprogramkan masih memprihatinkan.
- (5) Untuk mengoptimalkan kegiatan COREMAP di tingkat desa, perlu diupayakan pendanaan organisasi LPSTK. Sulit kiranya kegiatan COREMAP dapat berjalan secara optimal tanpa diberikan pendanaan yang memadai, mengingat besarnya peran yang diemban LPSTK sebagai roda penggerak program kegiatan. Dengan adanya pendanaan dan ditunjang dengan peralatan kerja yang memadai akan mengisi kegiatan keberadaan “podok informasi.”
- (6) Sosialisasi program kegiatan COREMAP masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan institusi-institusi sosial yang ada serta berbagai media komunikasi setempat antara lain radio pemerintah daerah dan radio amatir. Hal ini dimaksudkan

untuk lebih mengefektifkan program-program sosialisasi yang selama ini telah dilakukan.

- (7) Kontrak kerja dengan pihak ke tiga, masih perlu dilanjutkan dengan mempertimbangkan kredibilitas pihak ke tiga, serta mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan. Dengan kata lain, pihak ke tiga bisa meninggalkan kegiatan yang ada sekiranya masyarakat telah mampu mengelola dan mengembangkan sendiri. Secara teknis administrative hal ini harus dimuat dalam kontrak kerja sama. Adapun soal pendanaan dapat dilakukan dengan sharing dana melalui APBD atau sumber lain.
- (8) Mekanisme penyaluran dana perlu diubah dengan cara memanfaatkan lembaga keuangan yang ada (BRI, BPD) sebagai penyalur pinjaman lunak kepada masyarakat kelompok binaan. Berbagai jenis kegiatan ekonomi produktif yang memang layak untuk didanai, perlu mendapat prioritas pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan masyarakat bahwa dana pinjaman merupakan pemberian gratis oleh negara, seperti program IDT dan JPS. Dengan demikian masyarakat peminjam (creditor) akan mempunyai rasa tanggung jawab dan sekaligus akan meningkatkan tertib administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, Dedi Supriadi, 2003, "Beyond Economy: Menyoal Masalah Identitas Pada Konflik-Konflik Kebudayaan", dalam *Masyarakat Indonesia*, Jilid XXIX No: 2, 2003. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2004. *Analisis Pengembangan Profil Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005. *Laporan Akhir Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai*.
- Bandiyono, Suko dan Antariksa IG. 2007. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia : Desa Tuapejat, Kabupaten Mentawai*. Jakarta: COREMAP-LIPI dan PPK-LIPI.
- CRITIC Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2006. "Laporan Sosial-Ekonomi Desa Tuapejat, Katurai dan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai". Mimeograph.
- Boyle, Patrick, 1981, *Planning Beter Program*, New York, McGraw Hill Book Company,
- Hardin, G. 1968 The Tragedy of the Commons, *Science*. 162 : 1243 – 1248.
- Nawawi & Ary Wahyono, 2007, *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, Desa Katurai, Kecamatan Siberut Selatan, Mentawai Sumatera Barat.*, Jakarta: PPK – LIPI.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, *Perubahan Rencana Strategik Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tuapejad*, Pemkab 26 Februari 2005,
- Sudirman Saad, 2003. *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Dian Pratama Printing.

SUMBER IONFORMASI

Kepala Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala Dinas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala Dusun Jati, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora, Kabupaten Mentawai.

Sibutet Pedagang Pengumpul Ikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Arnold, Staf Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tua-tua Adat Suku Katubo Oinan (Keluarga Anjelus) Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ketua LPSTK Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jajaran Pengurus LPSTK Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ketua Dewan Perwakilan Desa (DPD) Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai.